



IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI

DI SEKTOR POLITIK

MELALUI *PENDIDIKAN* ANTIKORUPSI

Disusun Oleh :

Giri Suprapdiono, ST, MA

NDH: A11

PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL

TINGKAT II ANGKATAN XVII

Kerjasama:

PUSBANGKOMPIMNAS DAN MASN LAN DAN

KEMENTERIAN PERTANIAN

2020

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenanNYA dan ridhonya, penyusunan Rancangan Proyek Perubahan (RPP) yang berjudul: **“STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DI SEKTOR POLITIK MELALUI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI”**, ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan.

Rancangan proyek perubahan ini merupakan uraian terhadap rencana tahapan yang akan di implementasikan dalam tahap Laboratorium Kepemimpinan yang dilaksanakan penulis bersama tim efektif dengan didukung mitra kerja internal dan eksternal. Dalam penyusunan proyek perubahan ini kami mengucapkan terimakasih yang kepada yang terhormat :

1. Seluruh Pimpinan KPK yang memberikan kesempatan mengikuti PKN II
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, SH, MH selaku mentor sekaligus Pimpinan KPK
3. Bapak Dr. Pahala Nainggolan, Deputi bidang Pencegahan selaku atasan
4. Bapak Cahya Harefa, Sekretaris Jenderal yang memfasilitasi diklat PKN II
5. Dr. P.M. Marpaung, M.Sc. selaku Pembimbing (*coach*) Proyek Perubahan
6. Tim penguji dan Widyaiswara LAN dan Narasumber Kementerian Pertanian
7. Seluruh TIM EFEKTIF dari Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) atas dukungan kepada penulis selama proses penyusunan proyek perubahan
8. Rekan rekan peserta Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XVII
9. Keluarga di rumah yang menemani dan memberi support proses Bekerja Dari Rumah (BDR) selama pandemi covid19.

Penulis menyadari bahwa Proyek Perubahan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun inovasi dan gagasan perubahan adalah yang menjadi intisari rancangan proyek perubahan ini. Semoga hasil dari proyek perubahan ini sesuai dengan yang direncanakan dan diharapkan yaitu politik yang bersih dan Indonesia bersih darikorupsi, dan pada akhirnya bermanfaat sebesar besarnya bagi rakyat Indonesia.

Salam sehat dan bahagia.

Giri Suprapdiono, ST, MA

LEMBAR PENGESAHAN
SEMINAR PROYEK PERUBAHAN

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN NASIONAL
TINGKAT II ANGKATAN XVII
PUSBANGKOMPIMNAS DAN MASN LAN DAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2020**

Nama : Giri Suprapdiono
NIP : 0000212
Instansi : Komisi Pemberantasan Korupsi
Jabatan : Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
Judul Proyek Perubahan : "Strategi Pemberantasan Korupsi Sektor Politik melalui Pendidikan Antikorupsi"

**TELAH DISEMINARKAN DAN DISETUJUI
PADA SEMINAR IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN**

Jakarta, 4 Desember 2020

Menyetujui,

COACH


Dr. P.M. Marpaung, M.Sc
NIP. 196405301987031001

PENGUJI


Ir. Razilu, MSi
NIP. 196511281991031002

MENTOR

Dr. Nurul Ghufron, SH, MH.
NIP. 0002231

RINGKASAN EKSEKUTIF

Strategi pendidikan antikorupsi yang dikedepankan dalam proyek perubahan ini adalah dengan memfokuskan ke perbaikan di sektor politik. Korupsi politik mendominasi penanganan perkara KPK sejak tahun 2004. Setidaknya ada sekitar 36% dari total perkara yang ditangani KPK adalah korupsi politik. Banyaknya kasus korupsi politik tersebut adalah titik awal untuk melakukan perbaikan strategi pemberantasan korupsi, sebagai prasyarat organisasi yang *agile*. Korupsi di sektor politik adalah layaknya titik "akupunktur" korupsi yang harus ditangani sebagai prioritas untuk memecahkan korupsi sistemik.

Sejauh ini, strategi pemberantasan korupsi melalui strategi penindakan dan pencegahan korupsi hasilnya belum optimal. Rentetan penangkapan kasus dalam OTT kepada pejabat politik yang berujung pada pemidanaan, tidak memberikan efek jera kepada koruptor tersebut, bahkan menjadi residivis atau bahkan mencalonkan menjadi pejabat politik kembali setelah keluar penjara. Memperbaiki strategi pemberantasan korupsi melalui strategi pendidikan, dengan menganalisis penyebab korupsi politik, untuk menyusun rencana dan implementasi program dan kegiatan kampanye anti korupsi, sosialisasi, pembekalan dan pendidikan non formal yang kreatif dan efektif bagi sektor politik (penyelenggara, parpol, peserta konstetasi, masyarakat sipil dan masyarakat) dan memasukkan materi dan kurikulum antikorupsi ke dalam proses pengkaderan politik melalui program PROPARPOL (Program pendidikan antikorupsi bagi Politisi), disertai dengan pengembangan kebijakan dan penguatan kelembagaan pendidikan dan peran serta masyarakat di KPK yang dapat secara efektif mendukung program tersebut.

Untuk kepentingan pelaksanaan kebijakan tersebut, proper ini telah melakukan perubahan kelembagaan secara mendasar, dalam rangka akselerasi upaya-upaya pemberantasan korupsi yang telah dan sedang dilakukan oleh KPK, terutama di epicentrum korupsi di sektor politik melalui strategi pendidikan antikorupsi secara total dan komprehensif yang menyentuh pelaksana pemilu, pemilih dan pserta pemilu. Strategi ini diterima dan diapresiasi oleh politikus dan pejabat partai politik dikarenakan sekaligus memberikan horizon yang lebih cerah, bersahabat , inklusif dan tidak menakutkan dengan pendekatan

pendidikan. Branding Proparpol (Program pendidikan antikorupsi bagi Politisi) diterima dengan baik oleh parpol.

Sebagai *project leader* mendapatkan banyak pembelajaran dari diklatpim PKN2 ini. Pembelajaran tersebut meliputi: Komunikasi secara informal dan strategis dari elite Partai Politik, pimpinan lembaga, dan stakeholder, tim efektif yang kuat dan tangguh adalah prasyarat penting dalam kesuksesan perubahan. Selain itu diperlukan keteladanan dari *project leader* kepada tim efektif dan sekaligus secara sadar dan konsisten membangun rasa kepemilikan (*ownership*) kepada tim efektif dan stakeholder agar bekerja penuh semangat dan penjiwaan yang utuh. Selain itu, kesuksesan perubahan membutuhkan strategi *marketing &* kepemimpinan kewirausahaan yang baik didukung tokoh masyarakat, agama, budayawan, seniman, KOL (Key Opinion Leader) dari medsos, dan praktisi politik itu sendiri akan sangat membantu kesuksesan program dan semua elemen pemberantasan korupsi.

Selain itu, kepemimpinan yang adaptif, membantu untuk mempertahankan daya tahan tim dan organisasi. Kreativitas berkembang dalam iklim adaptif dan *time management yang* baik adalah kunci memenangkan tantangan dalam segala keterbatasan, termasuk di situasi pandemi Covid-19 saat ini. ***

DAFTAR ISI

Lembaran Pengesahan	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran	vii

SEKILAS ORGANISASI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Deskripsi Kondisi Umum	2
I.3. Pemilihan Penetapan Area Perubahan	3
I.4. Keterkaitan Area Perubahan dengan isu Strategis Kebijakan Organisasi..	3

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT PERUBAHAN

II.1. Tujuan Proyek Perubahan	4
II.2. Manfaat Proyek Perubahan.....	4

BAB III OUTPUT KUNCI (*PROJECT KEY DELIVERABLES*)

III.1 Output	
III.2 Output Jangka Pendek.....	
III.3. Output Jangka Menengah.....	
III.4. Output Jangka Panjang.....	

BAB IV PENTAHAPAN (MISLESTONE) DAN CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

IV.1. Pelaksanaan Capaian Kegiatan Milestone Jangka Pendek.....	8
IV.2. Pelaksanaan Capaian Kegiatan Milestone Jangka Menengah	12
IV.3. Pelaksanaan Capaian Kegiatan Milestone Jangka Menengah	15
IV.4. Uraian Pencapaian Kegiatan Jangka Pendek	

BAB V PENGELOLAAN SUMBERDAYA

V.1. Sumberdaya Daya Kebijakan	18
V.2. Sumber Daya Manusia.....	20
V.3. Anggaran.....	21

V.4. Sarana Prasarana.....	22
BAB VI STRATEGI KOMUNIKASI DAN MANAJEMEN STAKEHOLDERS	
VI.1. Strategi Komunikasi	23
VI.2. Manajemen Stakeholder.....	24
BAB VII STRATEGI DIALOG DAN PEMASARAN SEKTOR PUBLIK	
VII.1. Strategi Dialog	25
VII.2. Pemasaran Sektor Publik	25
BAB VIII FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN	26
BAB IX KENDALA/RESIKO DAN SOLUSI	27
BAB X LESSONS LEARNED KEPEMIMPINAN	28
BAB XI MEMBANGUN ORGANISASI PEMBELAJAR	29
LAMPIRAN	30

DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>	<i>1. Tahapan Kegiatan</i>	<i>14</i>
<i>Tabel</i>	<i>2. Tabel Implementasi Milestone/Pentahapan Kegiatan Jangka pendek</i>	<i>23</i>
<i>Tabel</i>	<i>3. Tabel Implementasi Milestone/Pentahapan Kegiatan Jangka pendek</i>	<i>25</i>
<i>Tabel</i>	<i>4. Tabel Implementasi Milestone/Pentahapan Kegiatan Jangka pendek</i>	<i>28</i>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur baru KPK tahun 2020	2
Gambar 2.	Strategi Pemberantasan Korupsi 3 Pronged Strategy (Strategi Trisula)	6
Gambar 3.	Perkembangan IPK (Indek Persepsi Korupsi) Indonesia tahun 1999-2019.....	7
Gambar 4.	Perbandingan Perkembangan IPK Indonesia dan Negara lain tahun 1999-2019.	8
Gambar 5.	Penanganan Perkara di KPK Tahun 2004-Mei 2020.....	9
Gambar 6.	Perkembangan skor IPAK Tahun 2012- 2020.....	9
Gambar 7.	Hasil penelitian LIPI terhadap kinerja lembaga Demokrasi Tahun 2018.....	10
Gambar 8.	Output Jangka Pendek, Menengah dan Panjang	18
Gambar 9.	Pencapaian Milestone Jangka Pendek Proper.....	22
Gambar 10	Pencapaian Milestone Jangka Menengah Proper.....	25
Gambar 11	Pencapaian Milestone Jangka Panjang Proper	27
Gambar 12.	Pencapaian Milestone Jangka Menengah yang terlaksana di Jangka Pendek..	27
Gambar 13.	Pencapaian Milestone Jangka Panjang yang terlaksana di Jangka Pendek.....	28
Gambar 14.	Rapat Tim Efektif dan Manajemen Strategis	30
Gambar 15.	Penanganan Perkara di KPK Tahun 2004-Mei 2020.....	30
Gambar 16	Rencana kegiatan Proper cluster 2 Pembekalan Pilkada Serentak.....	31
Gambar 17	Cluster 2 Rangkaian Pembekalan Pilkada.....	32
Gambar 18	Wilayah Target Pembekalan Pilkada.....	32
Gambar 19	Wilayah Target Pembekalan Pilkada Berintegritas.....	32
Gambar 20	Sembilan Wilayah Target Pembekalan Pilkada Offline dan onlie	33
Gambar 21.	Flyers promosi acara FGD Inseri Pendidikan Antikorupsi Partai Politik	33
Gambar 22	Dokumen Komitmen Parpol Penyelenggaran Pendidikan Antikorupsi pada Parpol	34

<i>Gambar 23</i>	<i>Kajian Persiapan Kelembagaan KPK yang dipimoin oleh Project Leader</i>	<i>34</i>
<i>Gambar 24</i>	<i>Daftar isi Kajian Persiapan Kelembagaan KPK yang dipimoin oleh Project Leader</i>	<i>35</i>
<i>Gambar 25</i>	<i>Struktur baru Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.....</i>	<i>35</i>
<i>Gambar 26</i>	<i>Struktur Baru KPK menurut Perkom No. 7 Tahun 2020.....</i>	<i>36</i>
<i>Gambar 27</i>	<i>Strategi Komunikasi yang dilakukan proper</i>	<i>38</i>
<i>Gambar 28</i>	<i>Kuadran Pemetaan Stakeholder sebelum implentasi proper.....</i>	<i>40</i>
<i>Gambar 29</i>	<i>Kuadran Pemetaan Stakeholder setelah implentasi proper</i>	<i>40</i>
<i>Gambar 30</i>	<i>Implementasi Marketing Sektor Publik.....</i>	<i>42</i>
<i>Gambar 31</i>	<i>Logo branding Marketing Sekor Publik PROPARPOL</i>	<i>43</i>
<i>Gambar 32.</i>	<i>Daftar Manajemen Organisasi Pembelajar</i>	<i>47</i>
<i>Gambar 33</i>	<i>. Dokumentasi Manajemen Organisasi Pembelajar.....</i>	<i>47</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Surat Tugas tim Efektif
Lampiran 2.	Rencana kegiatan Pendidikan, sosialisasi Pilkada BERintegritas
Lampiran 3.	Dokumenatsi Pembekalan Pilkada Berintegritas Nasional
Lampiran 4.	Dokumentasi Pembekalan Pilkada Berintegritas Wilayah 1 sd 9
Lampiran 5.	Video pelaksanaan rangkaian kegiatan Pilkada Berintegritas
Lampiran 6.	Pemberitaan pembekalan Pilkada Berintegritas
Lampiran 7.	Lembar Komitmen 9 Parpol
Lampiran 8.	Video konpers insersi pendidkan antikorupsi pada parpol.....
Lampiran 9.	Logo PROPARPOL
Lampiran 10.	Testimoni peserta Pembekalan dari 3 Cakada.....
Lampiran 11	Testoni dari LIPI dan Kemendagri
Lampiran 12	Peraturan KPK no 7 Tahun 2020.....
Lampiran 13	Anggaran Baru Keputusan Pendidikan dan Peranserta Masyarakat
Lampiran 14	Renstra KPK 2020-2025
Lampiran 15	Video Gerakan musisi, budayawan dan artis melawan korupsi & politis uang
Lampiran 16	Video Key Opinion Leaders.....
Lampiran 17	Pemberitaan terkait proper
Lampiran 18	Terstimoni Pejabat Parpol
Lampiran 19	Testimoni mentor
Lampiran 20	Testimoni Pimpinan KPK
Lampiran 21	Video Gerakan musisi, budayawan dan artis melawan korupsi & politis uang
Lampiran 22	Video Key Opinion Leaders.....

Lampiran 23 Kajian Penguatan kapasitas kelembagaan Pendidikan dan Peranserta Masyarakat

Lampiran 24 Struktur baru KPK tahun 2020.....

Lampiran 25 Peraturan KPK no 7 Tahun 2020.....

Lampiran 26 Anggaran Baru Keputusan Pendidikan dan Peranserta Masyarakat

Lampiran 27 Video KOL (Key Opinion leader).....

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

SEKILAS ORGANIASI DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT KPK



Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi amanat melakukan Pencegahan korupsi dengan melakukan sosialisasi antikorupsi, pendidikan anti dan kampanye

program anti korupsi kepada masyarakat secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.

Struktur organisasi Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat diatur melalui Peraturan Komisi (Perkom) No. 7 Tahun 2020 yang mulai berlaku 11 November 2020. Tugas dan fungsi Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat disamakan dengan tugas dan fungsi Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat adalah sebagai berikut:

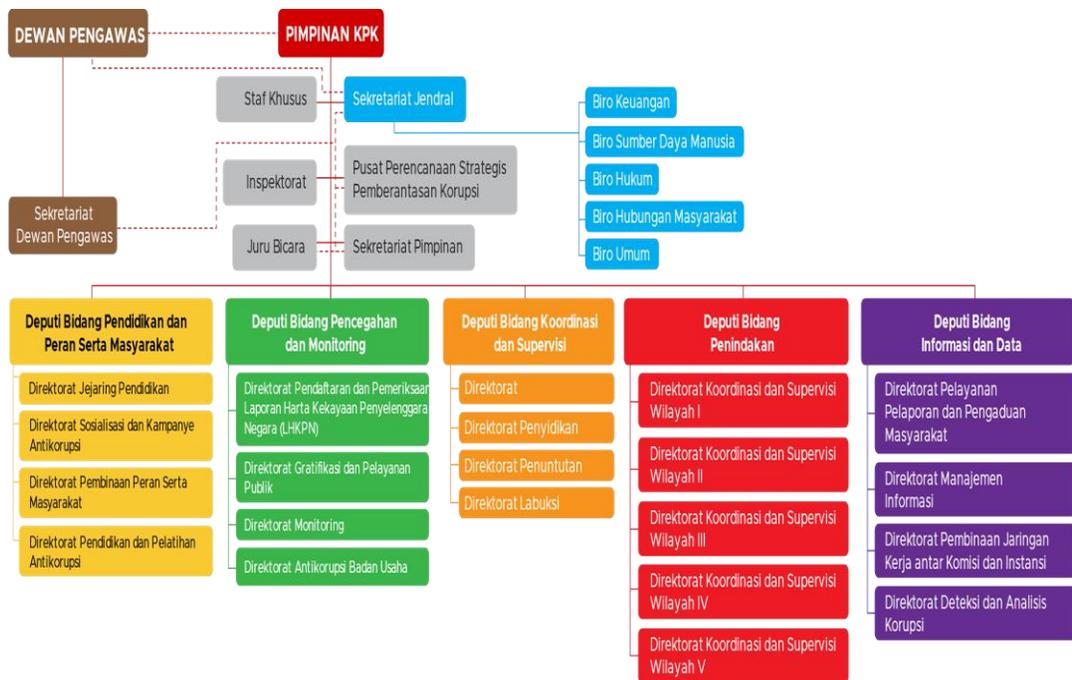
1. perumusan kebijakan teknis pada bidang pendidikan dan peran serta masyarakat yang meliputi jejaring pendidikan, sosialisasi dan kampanye antikorupsi, pembinaan peran serta masyarakat, dan pendidikan dan pelatihan antikorupsi;
2. pelaksanaan kajian, telaahan dan/atau riset dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas di Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat;
3. penyelenggaraan program pendidikan antikorupsi pada setiap jejaring pendidikan;
4. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi dan kampanye antikorupsi;
5. merencanakan dan menyiapkan program sertifikasi antikorupsi;
6. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan dan pembinaan sumber daya manusia pada Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat;
7. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan hubungan kerja antar direktorat pada Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat; dan

- pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya atas perintah Pimpinan.

Dalam struktur baru yang diatur dalam perkom ini, ini Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat dinaikkan fungsinya menjadi levelkedeputian eselon 1 yang membawahi 4 direktorat, meliputi:

- Direktorat Jejaring Pendidikan
- Direktorat Sosialisasi dan Kampanye
- Direktorat Peran Serta Masyarakat
- Direktorat Pendidikan dan Pelatihan
- Sekretarian Kedeputian Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.

Perubahan struktur tersebut merupakan hasil salah satu dari implementasi proper yang dilakukan oleh *Project Leader* bersama tim efektif. Sehingga struktur Organisasi KPK yang baru adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur baru KPK tahun 2020

Adapun Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan: a tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi; b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; c monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan

negara; d supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi; e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan f tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

Menurut Pasal 28 ayat (3), Direktorat Dikyanmas memiliki Fungsi:

- a. penyusunan rumusan kebijakan, perencanaan, pengendalian, evaluasi, pengadministrasian, pengamanan kegiatan, pengembangan sistem, prosedur operasi baku, dan metoda kerja dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah korupsi melalui pendidikan antikorupsi di setiap jenjang pendidikan, sosialisasi program pemberantasan tindak pidana korupsi dan kampanye antikorupsi;
- b. penyusunan, pengkoordinasian, mendorong kebijakan, monitoring dan evaluasi Desain Nasional pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan di sektor pendidikan formal maupun non-formal.
- c. Penyusunan, pengkoordinasian, mendorong kebijakan, monitoring dan evaluasi desain program pendidikan antikorupsi di lingkungan kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, sektor swasta, sektor politik, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat umum.
- d. Perancangan dan perbantuan pelaksanaan program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, sektor swasta, sektor politik, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum;
- e. pelaksanaan program kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum secara langsung atau tidak langsung;
- f. Pelayanan atas inisiatif kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, sektor swasta, sector politik, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat umum terkait sosialisasi program pemberantasan tindak pidana korupsi dan kampanye antikorupsi;
- g. Sinergi dan kolaborasi pelaksanaan program pendidikan antikorupsi, sosialisasi program pemberantasan tindak pidana korupsi dan kampanye antikorupsi di kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, sector Swasta, sector politik, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat umum;
- h. Pelayanan satu pintu atas inisiatif internal terkait standarisasi materi dan konten program sosialisasi program pemberantasan tindak pidana korupsi dan kampanye antikorupsi;
- i. iPelaksanaan tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya atas perintah Deputy Bidang Pencegahan; dan
- j. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas secara periodik dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB I. PENDAHULUAN

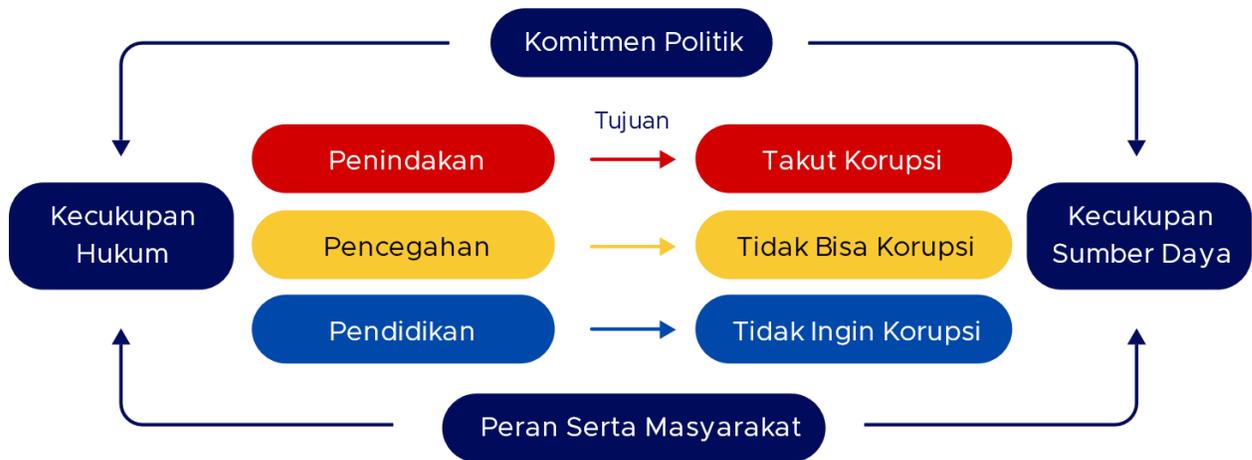
I.1. Latar Belakang

Pemberantasan korupsi bukanlah upaya yang mudah, namun suatu keniscayaan untuk bisa dilakukan suatu negara. Upaya tersebut membutuhkan waktu lama, namun bisa dilakukan dilakukan dengan cara yang lebih cepat apabila dilakukan dengan strategi secara tepat. Salah satu strategi yang jarang digunakan dalam pemberantasan korupsi adalah dengan menjalankan *silent revolution* yaitu upaya pendidikan antikorupsi dengan membangun karakter dan budi pekerti yang dapat melawan sifat koruptif pada manusia. Kemampuan memimpin diri atau dikenal dengan integritas sangatlah diperlukan, terutama menjaga diri di kala kesendirian bagi seorang pejabat atau penyelenggara negara. Bagi pengambil keputusan dan manusia kebanyakan, selalu ada pilihan dan setiap keputusan yang diambil setiap saat. Mendidik Penyelenggara Negara dan Penegak hukum untuk membangun integritas dan menjaga keputusan sehingga memperoleh *self mastery* yang handal, adalah salah satu tujuan utama dari pendidikan antikorupsi.

Seiring mandat dengan UU No19 tahun 2019 sebagai perubahan UU KPK No.30 tahun 2002, dan perubahan sosial ekonomi yang sangat dinamis pada tingkat lokal maupun global, mendorong KPK untuk mereformulasikan ulang strategi adaptasi untuk dapat berperan lebih maksimal. Tidak terkecuali dalam strategi pemberantasan korupsi, proses pembaruan lingkungan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun daerah seta lingkungan yang terkait, berlangsung dengan cepat, membutuhkan respon yang tidak biasa termasuk dalam penerapan strategi untuk menghalau sejak awal korupsi, atau disebut dengan strategi *preemptive*. Startegi *pre-emptive* merupakan pelengkap stategi *preventive* (pencegahan) dan *Curative/Represive* (penindakan). Strategi pemberantasan korupsi menuntut perubahan-perubahan besar dalam era *disruption*. Jika tidak, maka upaya tersebut akan tertinggal oleh laju perubahan. Pada akhirnya, tugas membangun peradaban bangsa yang berintegritas akan jauh dari harapan.

Masyarakat umumnya hanya mengenal strategi penindakan dan pencegahan korupsi, strategi pendidikan belum dipahami dan belum populer di kalangan masyarakat awam. Mereka

cenderung meletakkan strategi pendidikan ke dalam strategi pencegahan, padahal keduanya mempunyai tujuan yang berbeda. Belajar praktik pemberantasan korupsi yang berhasil di negara lain seperti Hongkong, Singapura dan Malaysia, menggunakan tiga pendekatan atau Trisula (*3 Pronged Strategy*). *Pertama*, dengan meniadakan itikad/keinginan untuk melakukan korupsi melalui pendidikan antikorupsi. Hasil akhir dari pendidikan adalah tidak ingin korupsi.



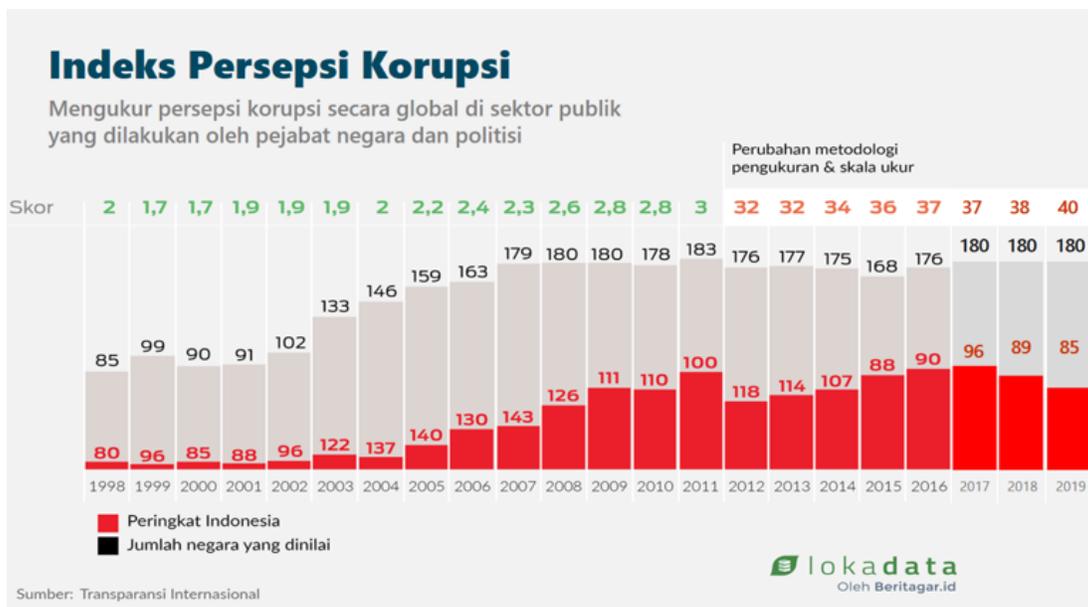
Gambar 2, Strategi Pemberantasan Korupsi dengan 3 Pronged Strategy (Strategi Trisula)

Strategi Kedua, dengan menutup celah atau titik yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan korupsi, melalui perbaikan sistem atau perbaikan kebijakan yang disebut juga pendekatan *preventive* atau pencegahan. Ketiga, dengan menimbulkan efek jera sehingga orang takut untuk melakukan korupsi, yakni dengan kegiatan penindakan (penyelidikan-penyidikan-penuntutan) atau dikenal dengan istilah *repressive* atau penindakan. *Ketiga*, pendekatan tersebut akan dilakukan secara paralel dan terkait satu dengan lainnya. Strategi tersebut akan sempurna apabila dilengkapi dengan strategi peningkatan peran serta masyarakat di ketiga strategi tersebut.

1.2. Deskripsi Kondisi Umum

Pemberantasan korupsi belum optimal, korupsi di sektor politik masih marak. Dari Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang secara rutin setiap tahunnya dikeluarkan oleh Transparency International, Indonesia mendapatkan skor 40 (dari total 100) dengan rangking 85 dari 180 negara. Skor ini relatif rendah dibandingkan negara peringkat atas seperti Denmark (87) dan

New Zealand (87). Namun demikian, kalau dilihat dari upaya perbaikannya, Indonesia adalah salah satu terbaik di dunia karena naik 23 point dalam rentang waktu 20 Tahun (1999-2019). Dengan skor IPK tersebut, Indonesia baru setara dengan negara Burkina Faso, Guyana, Trinidad-Tobago, Kuwait dan Lesotho. Sejak dibentuknya KPK pada tahun 2002, kenaikan IPK Indonesia dalam rentang waktu tahun 1999-2019, naik sebesar 23 poin (asumsi IPK dalam satu skala 0-100). Kenaikan IPK ini merupakan kenaikan IPK tertinggi dan terbaik di 180 negara yang disurvei. Dari data yang dikeluarkan Transparency Indonesia, dalam rentang yang sama RRC hanya mampu meningkatkan IPK 7 poin, Nigeria naik 12 poin bahkan Brazil justru turun 6 poin. Lihat gambar 2.

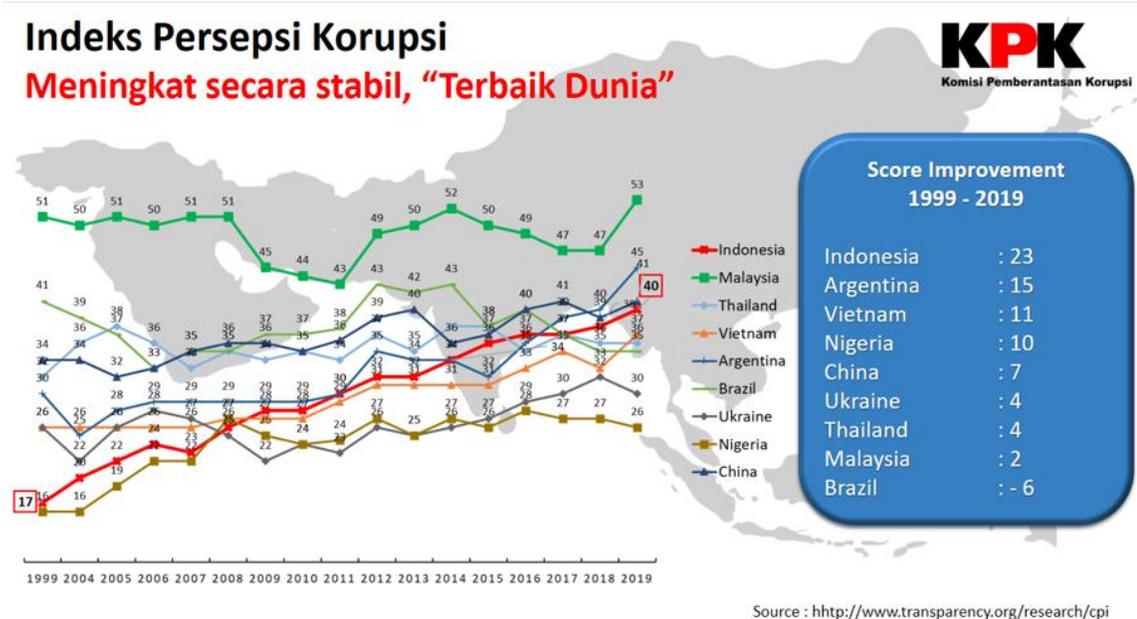


Gambar 3. Perkembangan IPK (Indek Persepsi Korupsi) Indonesia tahun 1999-2019

Hal ini sekaligus, menegaskan bahwa keberadaan KPK tidak mampu mengurangi korupsi di Indonesia. Pekerjaan mendasarnya adalah, skor 40 terhadap 100 masih jauh dari rata rata Asia pasifik dan Dunia.

Kalau kita pelajari lebih detil indeks IPK tersebut, Indonesia mempunyai masalah sangat serius di 3 indeks utama yaitu: 1) *World Justice Project-Rule of Law Index* dengan skor hanya 21; 2) *Varietis Democracy Project* dengan skor 28P; dan *ERC Asia Risk Guide* dengan skor 35. Skor ini dapat dijelaskan bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh berbagai pihak, masih

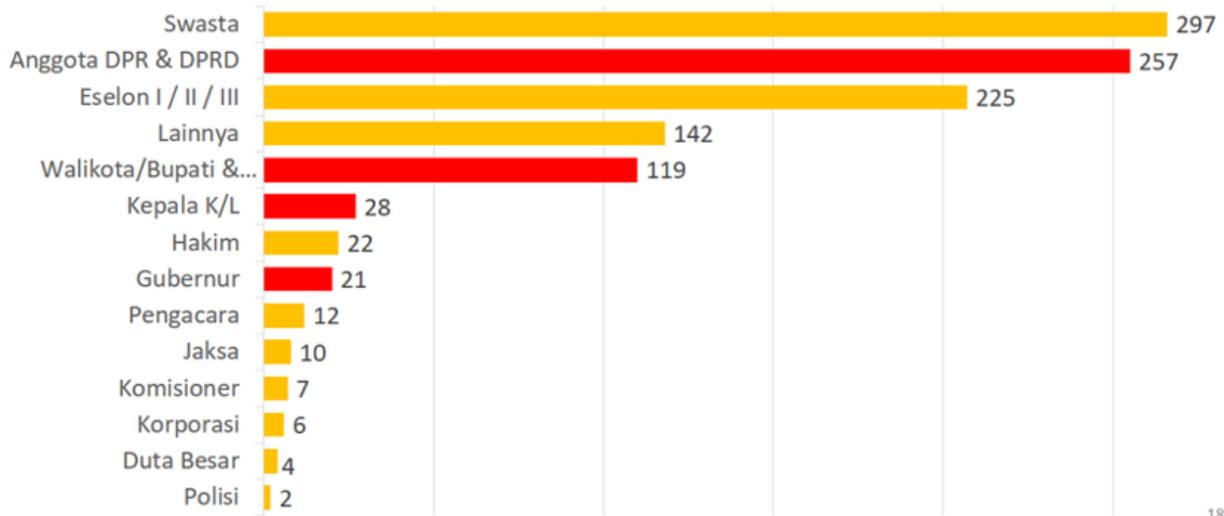
belum bisa menyelesaikan secara tuntas korupsi di 7 area demokrasi, korupsi di penegak hukum, eksekutif, legislative, kantor pajak dan bea cukai, militer dan lembaga pengawasan lainnya. Hal ini diperparah dengan banyaknya kasus korupsi yang “terdesentralisasi” di tingkat propinsi, kabupaten/kota dan bahkan desa.



Gambar 4. Perbandingan Perkembangan IPK Indonesia dan Negara lain tahun 1999-2019

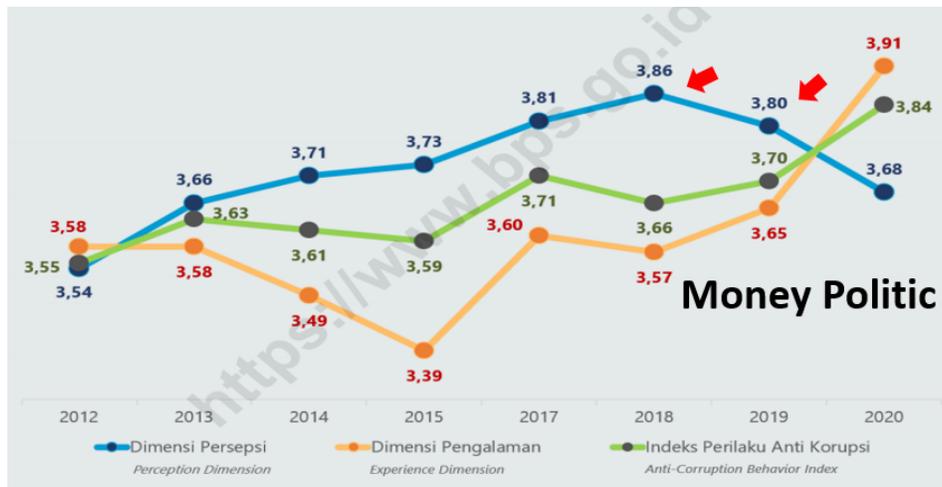
Korupsi politik mendominasi penanganan perkara di KPK sejak berdiri, tidak kurang 36% dari total perkara yang ditangani KPK atau 397 perkara korupsi yang melibatkan pejabat politik Kepala daerah dan DPR/DPRD (Gambar 4). Banyaknya kasus korupsi politik tersebut harus dijadikan KPK sebagai titik total pemberantasan korupsi.

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia



Gambar 5. Penanganan Perkara di KPK Tahun 2004-Mei 2020

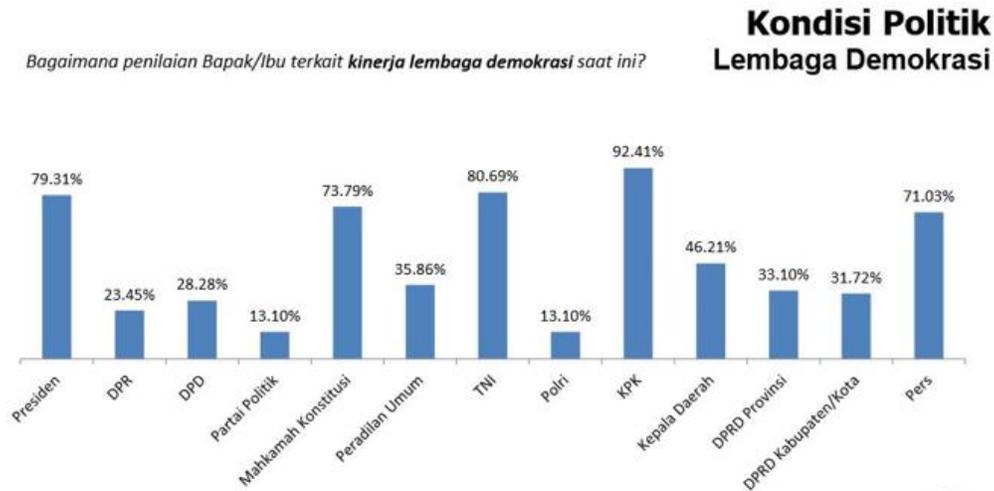
Dari pengukuran tingkat permisifitas masyarakat Indonesia, yang diukur BPS dengan melibatkan 10.000 rumah tangga seluruh Indonesia didapatkan temuan penting bahwa ada penurunan indikator Indeks pemahaman IPAK (Indeks Perilaku Antikorupsi) dari sisi pemahaman di tahun 2020, hal ini dikarenakan semakin permisifnya masyarakat dalam menerima politik uang dalam pilkada. (Gambar 5). Data ini menegaskan ada masalah serius dalam korupsi politik di Indonesia. Baik dari sisi parpol, penyelenggara dan pemilih memerlukan penanganan khusus melalui strategi dan program yang tepat.



Sumber/Source: BPS, SPAK 2020/ BPS-Statistics Indonesia, 2020 Anti-Corruption Behavior Survey

Gambar 6. Perkembangan skor IPAK Tahun 2012- 2020

Kepercayaan dan citra positif kepada lembaga politik seperti DPR dan Parpol sangat rendah. Hal ini bisa dilihat survey yang dilakukan oleh LIPI kepada responden ahli pada tahun



Gambar 7. Hasil penelitian LIPI terhadap kinerja lembaga Demokrasi Tahun 2018

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pengertian ini sudah menunjukkan bahwa tujuan pendidikan nasional di Indonesia meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Bahkan kita bisa beranggapan bahwa sisi pembangunan sikap dan perilaku seharusnya memiliki proporsi yang lebih besar, ataupun minimal sama dengan aspek pengetahuan dan keterampilan. Ini seharusnya juga menjadi pedoman pemangku pendidikan di Indonesia, termasuk KPK yang memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan antikorupsi di setiap jejaring pendidikan.

Strategi pendidikan merupakan salah satu pilihan strategi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini setidaknya terlihat dari tugas yang diberikan kepada komisi pemberantasan korupsi melalui UU KPK. Salah satu tugas yang diamanahkan ke KPK adalah melakukan pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi. Tugas ini dijawantahkan dalam sejumlah program yang dilakukan oleh KPK sejak tahun 2002 sampai dengan saat ini. Dalam proses

pendidikan antikorupsi, KPK secara khusus membuka ruang untuk peran serta masyarakat. Sebab pendidikan dalam rangka pembentukan karakter bangsa merupakan tugas bersama semua elemen bangsa.

Sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam membangun generasi antikorupsi, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan peraturan khusus. Peraturan tersebut pada prinsipnya mengadopsi nilai-nilai antikorupsi dalam setiap proses dan jenjang pembelajaran yang dilakukan. Nilai-nilai antikorupsi yang dimaksud mencakup nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, disiplin, dan adil. Pandangan yang umum diterima bahwa dalam membentuk karakter dan sifat yang baik, pendidikan yang anti terhadap perilaku korupsi harus dilakukan sejak dini. Karena pada usia dini-lah, pondasi kepribadian akan mudah dibentuk. Namun sebagai sebuah siklus, karakter dan sifat seseorang akan mengalami perubahan sejalan dengan perjalanan hidupnya. Sehingga pendidikan anti korupsi haruslah dilakukan secara terus menerus, dan dilakukan pada semua komponen masyarakat. Karenanya, pendidikan antikorupsi merupakan sebuah kerja besar dan tidak boleh berhenti dalam perjalanan hidup bangsa ini.

Pendidikan yang dimaksud dalam proyek perubahan ini adalah pendidikan non formal yang merupakan pelengkap dari pendidikan formal merupakan pendidikan di sekolah yang di peroleh secara teratur, sistematis, bertingkat atau berjenjang, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Sedangkan pendidikan kepada sektor politik menekankan Pendidikan nonformal yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang melalui pengkaderan di parpol dan siklus pendidikan karakter melalui tahapan kampanye, sosialisasi dan Pendidikan non formal. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap dan karakter antikorupsi.

Dari analisis lingkungan dan skenario yang terjadi yang ada saat ini, dirumuskan beberapa isu penting untuk dipecahkan antara lain:

- Revisi UU KPK sudah dilakukan, kelembagaan dan strategi perlu disesuaikan
- Resep pemberantasan korupsi sudah bagus, kurang dosis karena kurang sumber daya dan kurang komprehensif

- Komitmen politik tidak stabil, dan sering tidak sejalan dengan pemberantasan korupsi, sehingga eksistensi kelembagaan korupsi sering terancam
- Menurunnya permisifitas korupsi masyarakat terhadap politik uang
- Belum adanya strategi dalam renstra KPK dan belum ada strategi pendidikan dan peran serta masyarakat secara terintegrasi dan melengkapi
- Perlunya peningkatan IPAK yang dikeluarkan sebagai indikator pendidikan anti korupsi melalui intervensi program yang tepat
- Belum ada program dan kegiatan terobosan dalam bidang pendidikan antikorupsi termasuk kampanye dan sosialisasi antikorupsi bagi sektor politik yang memadai dan kreatif

Dampak dari situasi diatas harus dipecahkan dengan proyek perubahan. Tidak adanya perubahan akan berdampak sebagai berikut:

- Politik akan selalu menjadi momok pemberantasan korupsi
- Dukungan politik akan terus menurun atau tidak stabil
- Komunikasi politik dalam pemberantasan korupsi terganggu
- Kasus korupsi politik tidak berkurang
- Masyarakat akan menjadi korban korupsi politik sekaligus tertular untuk melakukan tindakan koruptif, seperti menerima politik uang dalam pemilu
- Politikus akan menyalahkan KPK, karena merasa menjadi korban, padahal dikarenakan pemahaman yang tidak memadai tentang KPK dan antikorupsi
- Penurunan indeks IPAK
- Korupsi semakin sulit diberantas karena tumbuhnya oligarki politik dan budaya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

I.3 Pemilihan Penetapan Area Perubahan

Untuk kepentingan pelaksanaan kebijakan tersebut, proper ini bertujuan untuk mengajukan strategi dan program untuk melakukan proses perubahan kelembagaan melalui proyek untuk mendorong akselerasi upaya-upaya pemberantasan korupsi yang telah dan sedang dilakukan oleh KPK, terutama di epicentrum korupsi di sektor politik melalui strategi pendidikan antikorupsi. Hal ini sebagai respon terhadap analisis permasalahan korupsi politik, dengan melakukan pendekatan pendidikan antikorupsi di sektor politik. Harapannya, strategi ini tidak

mengundang penolakan politikus yang sensitif dengan pendekatan penindakan dan sekaligus memberikan horizon yang lebih cerah dan tidak menakutkan dengan pendekatan pendidikan.

Di sisi lain, KPK belum mempunyai strategi penguatan kapasitas yang memadai di KPK untuk menjalankan amanat UU untuk di bidang pendidikan. Diperlukan terobosan pola pendidikan anti korupsi di sektor politik sebagai epicentrum korupsi di Indonesia melalui pendekatan pendidikan non formal yang meliputi program kampanye, sosialisasi dan pendidikan non formal (pengkaderan) antikorupsi bagi sektor politik.

Rancangan proyek perubahan ini mengulas terobosan penggunaan strategi pendidikan sebagai strategi utama dalam pemberantasan korupsi yang dirumuskan dalam bentuk program dan kegiatan pendidikan yang komprehensif dalam rangka menurunkan korupsi di sektor politik. Memperbaiki strategi pemberantasan korupsi melalui strategi pendidikan, dengan menganalisis penyebab korupsi politik, untuk menyusun rencana dan implementasi program dan kegiatan kampanye anti korupsi, sosialisasi, pembekalan dan pendidikan non formal yang kreatif dan efektif bagi sektor politik (penyelenggara, parpol, peserta konstetasi, masyarakat sipil dan masyarakat) dan memasukkan materi dan kurikulum antikorupsi ke dalam proses pengkaderan politik yang telah ada, disertai dengan pengembangan kebijakan dan penguatan kelembagaan yang dapat secara efektif menjalankan program tersebut.

1.4 Keterkaitan Area Perubahan dengan Isu Strategis Kebijakan Organisasi

Area perubahan ini sangat terkait dengan isu strategis Organisasi. Strategi pendidikan antikorupsi yang dikedepankan dalam proyek perubahan ini adalah dengan memfokuskan ke perbaikan di sektor politik. Korupsi politik mendominasi penanganan perkara KPK sejak tahun 2004. Setidaknya ada sekitar 36% dari total perkara yang ditangani KPK adalah korupsi politik (Lihat Tabel 1). Banyaknya kasus korupsi politik tersebut adalah titik awal penting dalam analisis lingkungan penyusunan strategi dan program pemberantasan korupsi. Korupsi di sektor politik adalah seperti titik "akupuntur" korupsi. Selain itu, korupsi di sektor sumberdaya alam, penerimaan negara, pelayanan publik, penegak hukum, dan sektor penting lain yang menjadi hajat hidup rakyat Indonesia adalah prioritas penting. Sejauh ini, strategi pemberantasan korupsi melalui strategi penindakan dan pencegahan korupsi hasilnya belum optimal.

Rentetan penangkapan kasus dalam OTT yang berujung pada pemidanaan, tidak memberikan efek jera kepada koruptor tersebut, bahkan menjadi residivis atau mencalonkan menjadi pejabat politik kembali setelah keluar penjara.

Pencegahan korupsi juga mengalami rintangan yang tidaklah mudah, dikarenakan kompleksitas permasalahan korupsi di tanah air. Ego sektoral menjadi sangat kental, dikarenakan motivasi menggunakan kekuasaan dan informasi sebagai tambahan penghasilan pegawai di sektor tersebut. Fenomena lain adalah adanya oligarki yang kuat, sehingga kepentingan pengusaha mencengkram keputusan kebijakan dan regulasi yang menguntungkan segelintir kelompok. Sehingga, di beberapa kasus yang ditangani KPK, dapat diambil pelajaran bahwa *state captured corruption* benar benar terjadi di Indonesia. Kasus yang menonjol di Indonesia adalah korupsi politik, korupsi yang dilakukan pejabat politik dan ada kaitannya dengan kegiatan politik. Kasus korupsi politik ini terjadi dipicu oleh biaya politik yang mahal, ketidakpedulian negara dalam pendanaan parpol sampai dengan penghargaan remunerasi pejabat publik yang tidak rasional, tidak kompetitif dan adanya suatu anomali manajemen. Anomali manajemen ini dapat digambarkan secara sederhana, bahwa anak buah mendapatkan remunerasi lebih rendah dibandingkan atasannya, remunerasi walikota dan bupati kalah dengan kepala dinas atau bupati, gaji kepala SKK Migas jauh lebih tinggi banding Menteri ESDM, dan masih banyak anomali manajemen lainnya.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT PERUBAHAN

II.1. Tujuan Proyek Perubahan

Adapun tujuan dari Proyek Perubahan **“STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DI SEKTOR POLITIK MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI”** adalah memperbaiki strategi pemberantasan korupsi melalui strategi pendidikan setara dengan Penindakan dan pencegahan korupsi, dengan membuat program dan kegiatan kampanye anti korupsi, sosialisasi, pembekalan dan pendidikan non formal yang kreatif dan efektif terkait bagi sektor politik (penyelenggara, parpol, peserta konstetasi (pemilu), masyarakat sipil, seniman, lintas agama dan masyarakat umum) dan memasukkan materi dan kurikulum antikorupsi ke dalam proses pengkaderan politik yang telah ada, disertai dengan pengembangan kebijakan dan kelembagaan pendidikan KPK yang dapat secara efektif menjalankan program tersebut.

II.2 Manfaat Proyek Perubahan

Manfaat Proyek Perubahan bagi stakeholder adalah:

- Dukungan Politik Pemberantasan Korupsi Menguat
- Masyarakat tidak permisif terhadap politik uang, terutama dalam pemilu dan pilkada
- Korupsi lebih efektif diberantas karena korupsi politik sebagai epicentrum diberantas secara efektif dengan 3 strategi + 1
- Memperbaiki kepercayaan publik di lembaga politik
- Kerjasama stakeholder bidang politik menguat
- Jejaring politikus antikorupsi terbentuk dan menguat terutama dikalangan politisi, seniman, agamawan dan masyarakat

Manfaat Proyek Perubahan bagi organisasi KPK adalah:

- Membaiknya komunikasi Politik pemberantasan korupsi
- Penurunan kasus korupsi politik

- Peningkatan indeks IPAK sebagai indikator kinerja utama KPK
- Penguatan kelembagaan KPK di bidang Pendidikan dan peran serta masyarakat
- Hubungan yang harmonis dengan lembaga lain terkait pemberantasan korupsi
- Sumberdaya KPK meningkat (anggaran, SDM dan Prasarana)

Manfaat Proyek Perubahan bagi kepemimpinan *Project Leader* adalah:

- Membangun kemampuan komunikasi dan dialog strategis dengan politikus
- Melatih aktualisasi kepemimpinan strategis terutama membangun integritas, karena sebagai acuan dan teladan
- Meningkatkan kemampuan mengorganisasi kelembagaan dan kepentingan nasional bukan sekedar lembaga
- Memperkuat jejaring politik dengan stakeholder
- Memperkuat energi kepemimpinan karena bekerja dengan passion dan kreatifitas
- Memperkuat kerjasama tim dengan rekan kerja, tim dan bawahan

BAB IV. OUTPUT KUNCI (PROJECT KEY DELIVERABLES)

IV.1. Output

Output kunci proyek perubahan yang terdiri dari jangka pendek, menengah dan panjang adalah:

1. Komitmen bersama & akses informasi pelaksanaan pelatihan parpol
2. Pembekalan pilkada dan membangun jejaring politikus antikorupsi (Pilkada & Pileg)
3. Gerakan Kultural tokoh lintas agama, budayawan masyarakat melawan politik uang
4. Bahan pembelajaran pelatihan antikorupsi bagi parpol
5. Rangkaian Program dan kegiatan Politik Berintegritas melalui kampanye antikorupsi, pembekalan, sosialisasi dan pendidikan pengkaderan
6. Pedoman untuk mengintegrasikan Pendidikan Antikorupsi dalam pengkaderan parpol
7. Kebijakan parpol untuk pendidikan antikorupsi
8. Penguatan Kelembagaan bidang Pendidikan di KPK
9. Renstra Pendidikan antikorupsi KPK

IV.2. Output Jangka Pendek (Minggu 1 Oktober – Minggu 5 November 2020)

Output Jangka Pendek tersebut diuraikan sebagai berikut:

- Jejaring dan pemahaman politikus antikorupsi melalui rangkaian Program dan kegiatan pembekalan pilkada serentak 2020, kampanye politik berintegritas, diskusi tematik politik
- Gerakan kultural masyarakat, agamawan, budayawan melawan politik uang
- Komitmen & akses informasi pelatihan dan pengkaderan partai politik
- Bahan pembelajaran pendidikan antikorupsi bagi sektor politik
- Usulan penguatan kelembagaan bidang pendidikan di KPK melalui renstra

IV.3. Output Jangka Menengah (Januari 2020 – Desember 2020)

Output Jangka Pendek tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Pedoman untuk menginterintegrasikan Pendidikan Antikorupsi dalam pengkaderan partai
2. Sosialisasi Kebijakan insersi pendidikan antikorupsi tentang pengkaderan dan pendidikan antikorupsi
3. Komitmen bersama (MOU/pakta/komitmen) parpol/lembaga politik dalam pengkaderan dalam pendidikan antikorupsi
4. Adanya draf regulasi kewajiban parpol dalam insersi pendidikan antikorupsi kedalam sistem pengkaderan parpol dari Kesbangpol Kemendagri atau KPU/Bawaslu

IV.4. Output Jangka Panjang (Januari 2020 – Desember 2020)

Output Jangka Panjang tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya Kebijakan kewajiban Parpol penerapan insersi Pendidikan Antikorupsi ke materi pengkaderan parpol
2. Terimplementasikannya Kebijakan pendidikan antikorupsi politik secara bertahap
3. Monev implementasi pendidikan antikorupsi politik
4. Adanya Kelembagaan bidang pendidikan di KPK yang kuat



Gambar 8. Ouput Jangka Pendek, Menengah dan Panjang

BAB V
PENTAHAPAN (MILESTONE) DAN CAPAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan proper ini, diperlukan pentahapan dalam mencapainya, yaitu jangka pendek, menengah dan panjang.

Tabel 1. Pentahapan Kegiatan

No.	Kegiatan Utama	Ouput
A	Jangka Pendek (sd 8 Desember 2020)	
1.	Membentuk Tim efektif Proyek Perubahan	Surat undangan KPK dan notulen
2.	Melaksanakan rapat dengan Tim efektif	Notulen Rapat dan dokumentasi
3.	Melakukan Perencanaan progarm dan anggaran	Rencana kesepakatan pelaksanaan insersi pendidikan antikorupsi
4.	Penyusunan bahan pembelajaran untuk pembekalan	Draf Bahan ajar
5.	Penyusunan kerangka program intervensi pilkada serentak 2020	Bahan ajar dan agenda pembekalan pilkada serentak
6.	Pelaksanaan diskusi dan Webinar terkait korupsi politik dan pilkada	Dokumentasi acara dan flyers
7.	Pelaksanaan pembekalan dan pendidikan Anti korupsi kepada peserta pilkada, penyelenggara	Dokumentasi kegiatan
8.	Pelaksanaan kampanye pilkada berintegritas bersama penyelenggara pemilu/pilkada kepada pemilih	Dokumentansi kegiatan
9.	Pelaksanaan FGD dan webinar gerakan kultural melawan politik uang oleh agamawan dan budayawan	Minutes of Meeting

10.	Penyusunan surat kepada parpol untuk memasukkan materi antikorupsi kedalam materi pengakderan partai politik, sosialisasi bagi penyelenggara pemilu, dan kampanye sosialisasi bagi pemilih dan masyarakat umum	Surat KPK kepada parpol
11.	Deklarasi dan gerakan melawan politik uang oleh tokoh agama, budayawan dan tokoh masyarakat sipil	<i>Dokumentasi dan publikasi kegiatan</i>
12	Pentas gerakan kultural melawan politik uang "Dongeng Negeri Kala Pandemi" oleh seniman di peringatan hari anti korupsi sedunia 2020.	<i>Dokumentasi dan publikasi kegiatan</i>
13	Pembahasan usulan renstra KPK dan penguatan kelembagaan KPK	Usulan melalui dokumen internal
B	Jangka Menengah (sd Desember 2021)	
1	Pertemuan FGD dengan lembaga politik untuk pembahasan pedoman dan rencana memasukkan materi antikorupsi ke pengkaderan parpol	Surat undangan KPK dan notulen
2	Pembahasan bersama materi antikorupsi bagi parpol dengan stakeholder	Notulen Rapat dan draf bahan ajar
3	Penyusunan materi antikorupsi bagi pengkaderan parpol dengan LIPI dan stakeholder terkait	Materi e-learning dan buku bahan ajar
4	Membentuk tim pengajar dan pakar	SK tim pengajar atau dokumentasi kegiatan
5	Komitmen bersama seluruh parpol untuk pendidikan anti korupsi	Lembar Komitmen
6.	Inseri materi ke kurikulum pengkaderan parpol di semua level	Agenda inseri pembelajaran antikorupsi

7.	Ujicoba pelaksanaan di beberapa parpol di level nasional dan regional	Dokumentasi kegiatan
8.	Pertemuan tingkat tinggi pendidikan antikorupsi politik di kalangan politikus, pimpinan KPK, Pimpinan Lembaga dan Tokoh Masyarakat	Dokumentasi kegiatan dan lembar komitmen
9.	Penyusunan kerangka monitoring dan evaluasi pendidikan antikorupsi bagi parpol	Laporan monev
10.	Pengusulan Pelatihan Kepemimpinan bersama Kader elit parpol tentang pendidikan anti korupsi di level nasional	Surat KPK kepada parpol
11.	Pembentukan Alumni Pendidikan Antikorupsi Politik	Direktori alumni dan WAG grup
12.	Pertemuan tahunan tim pembangun integritas partai politik	Dokumentasi dan publikasi kegiatan
13.	Deklarasi politik berintegritas, berantas korupsi sampai tuntas oleh ketua parpol di hari anti korupsi 2021	Pakta deklarasi dan dokumentasi
14.	Penyusunan indikator dan usulan kegiatan Pendidik Antikorupsi Award kategori politik	Pedoman pemberian award
15.	Draf peraturan penguatan kelembagaan pendidikan dan peran serta masyarakat	Draf peraturan KPK
C.	Jangka Panjang (sd Desember 2022)	
1	Penyusunan rencana kerja dalam rangka penyusunan naskah akademis UU parpol untuk memasukkan pendidikan anti korupsi dan program intervensi pencegahan korupsi	Draf naskah akademis
2	Rangkaian FGD penyusunan Revisi UU Parpol	Naskah akademis
3	Kajian bersama politik terkait pendanaan, pilkada dan Sistem integritas parpol	Hasil kajian dan rekomendasi
4	Publikasi Kajian politik terkait pendanaan, pilkada dan Sistem integritas parpol	Pemberitaan

5	Sosialisasi kajian dan praktik terbaik pendidikan antikorupsi di politik ke parpol	dokumentasi
6	Penerapan Kebijakan pendidikan antikorupsi ke seluruh parpol	Laporan dan dokumentasi
7	Monitoring dan evaluasi implementasi pendidikan antikorupsi bagi sektor politik	Laporan dan dokumentasi
8	High level meeting Pertemuan Kebangsaan “ Menyemai Harapan Negeri pasca Pandemi” yang melibatkan Ketua parpol, Kepala Negara, Pimpinan KPK, Tokoh Masyarakat dan agamawan, Budayawan dan perwakilan masyarakat sipil dan media di Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022	Pemberitaan, Publikasi dan dokumentasi
9	Peraturan kelembagaan pendidikan dan peran serta masyarakat dan penambahan sumberdaya manusia dan anggaran	Peraturan Komisi
10	Penyusunan laporan perubahan	Laporan

V.1. Pelaksanaan Capaian Kegiatan Milestone Jangka Pendek

Pencapaian kegiatan dalam proyek perubahan ini dapat dilihat sebagai berikut:

KEGIATAN		OUTPUT	WAKTU	STAKEHOLDER
1.	Membentuk Tim efektif Proyek Perubahan	Surat Tugas Pimpinan KPK	M1 Okt 2020	Internal - Direktorat Diyanimas
2.	Melaksanakan rapat dengan Tim efektif	Notulen Rapat dan Rencana Kerja	M1- M2 Okt 2020	Direktorat Diyanimas, PJKAKI, Humas, Litbang
3.	Melakukan Perencanaan program dan anggaran	KAK	M1-M3 Okt 2020	Biro Keuangan
4.	Penyusunan bahan pembelajaran untuk pembekalan	Bahan ajar atau materi pembekalan	M2 Okt – M2 Nov 2020	Kesbangpol, LIPI, Perudem, Pusako
5.	Penyusunan kerangka program intervensi pilkada serentak 2020	Rencana kerja	M1-M2 Okt 2020	Kesbangpol, LIPI, KPU, Bawaslu, Perudem, Pusako
6.	Pelaksanaan diskusi dan Webinar terkait korupsi politik dan pilkada	Dokumentasi kegiatan	M2 Okt – M2 Nov 2020	Kesbangpol, LIPI, Perudem, tokoh masyarakat dan tokoh agama
7.	Pelaksanaan pembekalan dan pendidikan Anti korupsi kepada peserta pilkada, penyelenggara	Dokumentasi kegiatan	M3 Okt – M4 Nov 2020	Pimpinan KPK, KPU, Bawaslu Kesbangpol, LIPI, Perudem, tokoh masyarakat dan tokoh agama, Dit.LHKPN, Dit. Gratifikasi, dit.pjkaki, biro humas
8.	Pelaksanaan kampanye pilkada berintegritas bersama penyelenggara pemilu/pilkada kepada pemilih	Dokumentasi kegiatan	M1-M4 Nov 2020	Pimpinan KPK, KPU, Bawaslu Kesbangpol, LIPI, Perudem, tokoh masyarakat dan tokoh agama, Dit.LHKPN, Dit. Gratifikasi, dit.pjkaki, biro humas
9.	Pelaksanaan FGD dan webinar gerakan kultural melawan politik uang oleh agamawan dan budayawan	Notulen dan dokumentasi	M1-M4 Nov 2020	KPK, Tokoh lintas agama, Budayawan, Seniman, , masyarakat sipil
10.	Deklarasi dan gerakan melawan politik uang oleh tokoh agama, budayawan dan tokoh masyarakat sipil	Dokumentasi pemberitaan	M1 Des 2020	KPK, Tokoh lintas agama, Budayawan, Seniman, , masyarakat sipil
11.	Dentas gerakan kultural melawan politik uang “Dongeng Negeri Kala Pandemi” oleh seniman di peringatan hari anti korupsi sedunia 2020.	Dokumentasi dan publikasi kegiatan	M1 Des 2020	KPK, Tokoh agama, Budayawan, Seniman, masyarakat sipil
12.	Penyusunan surat kepada parpol untuk memasukkan materi antikorupsi ke dalam materi pengkaderan partai politik, sosialisasi bagi penyelenggara pemilu, dan kampanye sosialisasi bagi pemilih dan masyarakat umum	Surat KPK kepada parpol	M4 Nov 2020	Seljen parpol, biro pengkaderan parpol, Pimpinan KPK, , masyarakat sipil
13.	Pembahasan usulan renstra KPK dan penguatan kelembagaan KPK	Regulasi KPK	M1 OKT – M4 NOV 2020	Biro Hukum, KKSP, Bag, Organisasi Biro renkeu KPK

Gambar 9. Pencapaian Milestone Jangka Pendek Proper

Milestone pencapaian jangka pendek dapat tercapai 100%, ada 5 target jangka menengah dan 1 target jangka panjang yang dapat terlaksana dalam proyek perubahan ini.

Tabel 2. Implementasi Milestone/Pentahapan Kegiatan Jangka Pendek

KEGIATAN	OUTPUT	STATUS	WAKTU	STAKEHOLDER
1. Membentuk Tim efektif Proyek Perubahan	Surat undangan KPK dan notulen	Selesai	M1 Okt 2020	Internal - Direktorat Diyanmas
2. Melaksanakan rapat dengan Tim efektif	Notulen Rapat dan dokumentasi	Selesai	M1- M2 Okt 2020	Direktorat Diyanmas, PJKAKI, Humas, Litbang
3. Melakukan Perencanaan program dan anggaran	Rencana kesepakatan pelaksanaan insersi pendidikan antikorupsi	Selesai	M1-M3 Okt 2020	Biro Keuangan
4. Penyusunan bahan pembelajaran untuk pembekalan	Draf Bahan ajar	Selesai	M2 Okt – M2 Nov 2020	Kesbangpol, LIPI, Perludem, Pusako
5. Penyusunan kerangka program intervensi pilkada serentak 2020	Bahan ajar dan agenda pembekalan pilkada serentak	Selesai	M1-M2 Okt 2020	Kesbangpol, LIPI, KPU, Bawaslu, Perludem, Pusako
6. Pelaksanaan diskusi dan Webinar terkait korupsi politik dan pilkada	Dokumentasi acara dan flyers	Selesai	M2 Okt – M2 Nov 2020	Kesbangpol, LIPI, Perludem, tokoh masyarakat dan tokoh agama
7. Pelaksanaan pembekalan dan pendidikan Anti korupsi kepada peserta pilkada, penyelenggara	Dokumentasi kegiatan	Selesai	M3 Okt – M4 Nov 2020	Pimpinan KPK, KPU, Bawaslu Kesbangpol, LIPI, Perludem, tokoh masyarakat dan tokoh agama, Dit.LHKPN, Dit. Gratifikasi, dit.pjkaki, biro humas

8. Pelaksanaan kampanye pilkada berintegritas bersama penyelenggara pemilu/pilkada kepada pemilih	Dokumentasi kegiatan	Selesai	M1-M4 Nov 2020	Pimpinan KPK, KPU, Bawaslu Kesbangpol, LIPI, Perludem, tokoh masyarakat dan tokoh agama, Dit.LHKPN, Dit. Gratifikasi, dit.pjkaki, biro humas
9. Pelaksanaan FGD dan webinar gerakan kultural melawan politik uang oleh agamawan dan budayawan	Minutes of Meeting	Selesai	M1-M4 Nov 2020	KPK, Tokoh lintas agama, Budayawan, Seniman, , masyarakat sipil
10. Penyusunan surat kepada parpol untuk memasukkan materi antikorupsi kedalam materi pengakderan partai politik, sosialisasi bagi penyelenggara pemilu, dan kampanye sosialisasi bagi pemilih dan masyarakat umum	Surat KPK kepada parpol	Selesai	M4 Nov 2020	Sekjen parpol, biro pengkaderan parpol, Pimpinan KPK, , masyarakat sipil
11. Deklarasi dan gerakan melawan politik uang oleh tokoh agama, budayawan dan tokoh masyarakat sipil	Dokumentasi dan publikasi kegiatan	Selesai	M1 Des 2020	KPK, Tokoh lintas agama, Budayawan, Seniman, , masyarakat sipil
12. Pentas gerakan kultural mealwan politik uang "Dongeng Negeri Kala Pandemi" oleh seniman di peringatan hari anti korupsi sedunia 2020.	Dokumentasi dan publikasi kegiatan	Selesai	M1 Des 2020	KPK, Tokoh agama, Budayawan, Seniman, masyarakat sipil
13. Pembahasan usulan renstra KPK dan penguatan kelembagaan KPK	Usulan melalui dokumen internal	Selesai	M1 OKT – M4 NOV 2020	Biro Hukum, KKSP, Bag, Organisasi Biro renkeu KPK

 *Terlaksana*

Jangka Menengah (sd Des 2021) **33% Terlaksana** ★

	KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU	STAKEHOLDER
★ →	1. Pertemuan FGD dengan lembaga politik untuk pembahasan pedoman dan rencana memasukkan materi antikorupsi ke materi pengkaderan parpol	Surat undangan KPK dan notulen	Jan – maret 2021	Kesbangpol, LIPI, Parpol, kesbangpol Kemendagri
★ →	2. Pembahasan bersama materi antikorupsi bagi parpol dengan satekholder	Notulen Rapat	Jan – maret 2021	Kesbangpol, LIPI, KPU, Bawaslu, Perludem, Pusako
★ →	3. Penyusunan materi antikorupsi bagi pengkaderan parpol dengan LIPI dan stakeholder terkait	KAK dan draft bahan ajar	April-Juni 2021	Kesbangpol, LIPI, Perludem, tokoh masyarakat dan tokoh agama
★ →	4. Membentuk tim pengajar dan pakar	Lembar komitmen dan publikasi	Juli – september Juni 2021	Pusat Edukasi Antikorupsi
★ →	5. Komitmen bersama seluruh parpol untuk pendidikan anti korupsi	Bahan ajar dan agenda pengkaderan antikorupsi	Juli – september Juni 2021	Direktorat Dikyanmas, PJKAKI, Humas, Litbang
★ →	6. Inseri materi ke kurikulum pengkaderan parpol di semua level	List nama pengajar	September – Des 2021	Kesbangpol, LIPI, Parpol, kesbangpol Kemendagri
★ →	7. Ujicoba pelaksanaan di beberapa parpol di level nasional dan regional	Dokumentasi kegiatan	September – Des 2021	Kesbangpol, LIPI, Parpol, kesbangpol Kemendagri KPU, Bawaslu
★ →	8. Pertemuan tingkat tinggi pendidikan antikorupsi politik di kalangan politikus, pimpinan KPK, Pimpinan Lembaga dan Tokoh Masyarakat	Dokumentasi kegiatan	September – Des 2021	Tokoh politik, parpol, tokoh masyarakat dan tokoh agama
★ →	9. Penyusunan kerangka monitoring dan evaluasi pendidikan antikorupsi bagi parpol	Laporan monev	September – Des 2021	Dit Dikyanmas
★ →	10. Pengusulan Pelatihan Kepemimpinan bersama Kader elit parpol tentang pendidikan anti korupsi di level nasional	Surat KPK kepada parpol	September – Des 2021	Kesbangpol, LIPI, Parpol, kesbangpol Kemendagri KPU, Bawaslu
★ →	11. Pembentukan Alumni Pendidikan Antikorupsi Politik	Direktori alumni dan WAG grup	September – Des 2021	Dit Dikyanmas dan Pusat Edukasi Antikorupsi
★ →	12. Pertemuan tahunan tim pembangun integritas partai politik	Dokumentasi dan publikasi kegiatan	September – Des 2021	Dit Dikyanmas dan Pusat Edukasi Antikorupsi
★ →	13. Deklarasi politik berintegritas, berantas korupsi sampai tuntas oleh ketua parpol di hari anti korupsi 2021	Pakta deklarasi dan dokumentasi	September – Des 2021	Kesbangpol, LIPI, Parpol, kesbangpol Kemendagri KPU, Bawaslu, Pimpinan KPK
★ →	14. Penyusunan Indikator dan pemberian Penghargaan pendidikan kategori politik	Pedoman pemberian award	September – Des 2021	Dit Dikyanmas KPK
★ →	15. Draf peraturan penguatan kelembagaan pendidikan dan peran serta masyarakat	Draf Perkom	September – Des 2021	Biro Hukum KPK, KemenpanRB, Kemenkeu, Bappenas

Gambar 10. Pencapaian Milestone Jangka Menengah Proper

Kegiatan tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 3. Implementasi Milestone/Pentahapan Kegiatan Jangka Menengah

KEGIATAN	OUTPUT	STATUS	WAKTU	STAKEHOLDER
1. Pertemuan FGD dengan lembaga politik untuk pembahasan pedoman dan rencana memasukkan materi antikorupsi ke pengkaderan parpol	Surat undangan KPK dan notulen	Selesai	Jan – maret 2021	Kesbangpol, LIPI, Parpol, kesbangpol Kemendagri
2. Pembahasan bersama materi antikorupsi bagi parpol dengan satekholder	Notulen Rapat dan draf bahan ajar		Jan – maret 2021	Kesbangpol, LIPI, KPU, Bawaslu, Perludem, Pusako
3. Penyusunan materi antikorupsi bagi pengkaderan parpol dengan LIPI dan stakeholder terkait	Materi e-learning dan buku bahan ajar	Selesai	April-Juni 2021	Kesbangpol, LIPI, Perludem, tokoh masyarakat dan tokoh agama
4. Membentuk tim pengajar dan pakar	SK tim pengajar atau dokumentasi kegiatan		Juli – september Juni 2021	Pusat Edukasi Antikorupsi

5. Komitmen bersama seluruh parpol untuk pendidikan anti korupsi	Lembar Komitmen	Selesai	Juli – september Juni 2021	Direktorat Dikyanmas, PJKAKI, Humas, Litbang
6. Inseri materi ke kurikulum pengkaderan parpol di semua level	Agenda inseri pembelajaran antikorupsi		September – Des 2021	Kesbangpol, LIPI, Parpol, kesbangpol Kemendagri
7. Ujicoba pelaksanaan di beberapa parpol di level nasional dan regional	Dokumentasi kegiatan		September – Des 2021	Kesbangpol, LIPI, Parpol, kesbangpol Kemendagri KPU, BAWASLU
8. Pertemuan tingkat tinggi pendidikan antikorupsi politik di kalangan politikus, pimpinan KPK, Pimpinan Lembaga dan Tokoh Masyarakat	Dokumentasi kegiatan dan lembar komitmen	Selesai	September – Des 2021	Tokoh politik, parpol, tokoh masyarakat dan tokoh agama
9. Penyusunan kerangka monitoring dan evaluasi pendidikan antikorupsi bagi parpol	Laporan monev		September – Des 2021	Dit Dikyanmas
10. Pengusulan Pelatihan Kepemimpinan bersama Kader elit parpol tentang pendidikan anti korupsi di level nasional	Surat KPK kepada parpol		September – Des 2021	Kesbangpol, LIPI, Parpol, kesbangpol Kemendagri KPU, BAWASLU
11. Pembentukan Alumni Pendidikan Antikorupsi Politik	Direktori alumni dan WAG grup		September – Des 2021	Dit Dikyanmas dan Pusat Edukasi Antikoruosi
12. Pertemuan tahunan tim pembangun integritas partai politik	Dokumentasi dan publikasi kegiatan		September – Des 2021	Dit Dikyanmas dan Pusat Edukasi Antikorupsi
13. Deklarasi politik berintegritas, berantas korupsi sampai tuntas oleh ketua parpol di hari anti korupsi 2021	Pakta deklarasi dan dokumentasi		September – Des 2021	Kesbangpol, LIPI, Parpol, kesbangpol Kemendagri KPU, BAWASLU, Pimpinan KPK
14. Penyusunan indikator dan usulan kegiatan Pendidik Antikorupsi Award kategori politik	Pedoman pemberian award		September – Des 2021	Dit Diyanmas KPK
15. Draf peraturan penguatan kelembagaan pendidikan dan peran serta masyarakat	Draf peraturan KPK	Selesai	September – Des 2021	Dit Diyanmas KPK

 *Terlaksana*

Jangka Panjang (sd Des 2022) ★ 20% Terlaksana

KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU	STAKEHOLDER
1. Penyusunan rencana kerja dalam rangka penyusunan naskah akademis UU parpol untuk memasukkan pendidikan anti korupsi dan program intervensi pencegahan korupsi	Draf naskah akademis	Jan – maret 2022	Kesbangpol, LIPI, KPU, Bawaslu, Perludem, Pusako
2. Rangkaian FGD penyusunan Revisi UU Parpol	Naskah akademis	Jan – maret 2022	Kesbangpol, LIPI, KPU, Bawaslu, Perludem, Pusako
3. Kajian bersama politik terkait pendanaan, pilkada dan Sistem integritas parpol	Hasil kajian dan rekomendasi	April-Juni 2022	Deputi pencegahan, LIPI, Parpol
4. Publikasi Kajian politik terkait pendanaan, pilkada dan Sistem integritas parpol	Pemberitaan	Juli – september Juni 2022	Humas . kedeputian pencegahan, dikanmas
5. Sosialisasi kajian dan praktik terbaik pendidikan antikorupsi di politik ke parpol	Laporan dan dokumentasi	Juli – september Juni 2022	Kesbangpol, LIPI, KPU pusat dan daerah Bawaslu, Perludem, Pusako, Bappenas
6. Penerapan Kebijakan pendidikan antikorupsi ke seluruh parpol	Laporan dan dokumentasi	September – Des 2022	Kesbangpol, LIPI, Perludem, tokoh masyarakat dan tokoh agama
7. Monitoring dan evaluasi implementasi pendidikan antikorupsi bagi sektor politik	Laporan dan dokumentasi	September – Des 2022	Pimpinan KPK, KPU, Bawaslu Kesbangpol, LIPI, Perludem, tokoh masyarakat dan tokoh agama, Dit.LHKPN, Dit. Gratifikasi, dit.pjkaki, biro humas, Bappenas
8. High level meeting Pertemuan Kebangsaan “ Menyemai Harapan Negeri pasca Pandemi” yang melibatkan Ketua parpol, Kepala Negara, Pimpinan KPK, Tokoh Masyarakat dan agamawan, Budayawan dan perwakilan masyarakat sipil dan media di Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022	Publikasi dan dokumentasi	September – Des 2022	Pimpinan KPK, KPU, Bawaslu Kesbangpol, Bappenas , LIPI, Perludem, tokoh masyarakat dan tokoh agama, Dit.LHKPN, Dit. Gratifikasi, dit.pjkaki, biro humas
9. Peraturan kelembagaan pendidikan dan peran serta masyarakat dan penambahan sumberdaya manusia dan anggaran	Peraturan Komisi	September – Des 2022	KemenpanRB, Kemenkumham, Kemenkeu, Bappenas
10. Penyusunan laporan perubahan	Laporan	September – Des 2021	Dit Diyanmas KPK

Gambar 11. Pencapaian Milestone Jangka Panjang Proper

V.2. Pelaksanaan Capaian Kegiatan Milestone Jangka Menengah

Pencapaian kegiatan dalam proyek perubahan ini dapat dilihat sebagai berikut:

Jangka Menengah (sd Des 2021) 33% Terlaksana ★

KEGIATAN	OUTPUT	WAKTU	STAKEHOLDER
1. Pertemuan FGD dengan lembaga politik untuk pembahasan pedoman dan rencana memasukkan materi antikorupsi ke materi pengkaderan parpol	Surat undangan KPK dan notulen	Jan – maret 2021	Kesbangpol, LIPI, Parpol, kesbangpol Kemendagri
2. Pembahasan bersama materi antikorupsi bagi parpol dengan stakeholder	Notulen Rapat	Jan – maret 2021	Kesbangpol, LIPI, KPU, Bawaslu, Perludem, Pusako
3. Penyusunan materi antikorupsi bagi pengkaderan parpol dengan LIPI dan stakeholder terkait	KAK dan draft bahan ajar	April-Juni 2021	Kesbangpol, LIPI, Perludem, tokoh masyarakat dan tokoh agama
4. Membentuk tim pengajar dan pakar	Lembar komitmen dan publikasi	Juli – september Juni 2021	Pusat Edukasi Antikorupsi
5. Komitmen bersama seluruh parpol untuk pendidikan anti korupsi	Bahan ajar dan agenda pengkaderan antikorupsi	Juli – september Juni 2021	Direktorat Dikyanmas, PIKAKI, Humas, Litbang
6. Inseri materi ke kurikulum pengkaderan parpol di semua level regional	List nama pengajar	September – Des 2021	Kesbangpol, LIPI, Parpol, kesbangpol Kemendagri
7. Ujicoba pelaksanaan di beberapa parpol di level nasional dan regional	Dokumentasi kegiatan	September – Des 2021	Kesbangpol, LIPI, Parpol, kesbangpol Kemendagri, KPU, Bawaslu
8. Pertemuan tingkat tinggi pendidikan antikorupsi politik di kalangan politikus, pimpinan KPK, Pimpinan Lembaga dan Tokoh Masyarakat	Dokumentasi kegiatan	September – Des 2021	Tokoh politik, parpol, tokoh masyarakat dan tokoh agama
9. Penyusunan kerangka monitoring dan evaluasi pendidikan antikorupsi bagi parpol	Laporan monev	September – Des 2021	Dit Dikyanmas
10. Pengusulan Pelatihan Kepemimpinan bersama Kader elit parpol tentang pendidikan anti korupsi di level nasional	Surat KPK kepada parpol	September – Des 2021	Kesbangpol, LIPI, Parpol, kesbangpol Kemendagri, KPU, Bawaslu
11. Pembentukan Alumni Pendidikan Antikorupsi Politik	Direktori alumni dan WAG grup	September – Des 2021	Dit Dikyanmas dan Pusat Edukasi Antikorupsi
12. Pertemuan tahunan tim pembangun integritas partai politik	Dokumentasi dan publikasi kegiatan	September – Des 2021	Dit Dikyanmas dan Pusat Edukasi Antikorupsi
13. Deklarasi politik berintegritas, berantas korupsi sampai tuntas oleh ketua parpol di hari anti korupsi 2021	Paikta deklarasi dan dokumentasi	September – Des 2021	Kesbangpol, LIPI, Parpol, kesbangpol Kemendagri, KPU, Bawaslu, Pimpinan KPK
14. Penyusunan indikator dan pemberian Penghargaan pendidikan kategori politik	Pedoman pemberian award	September – Des 2021	Dit Dikyanmas KPK
15. Draf peraturan penguatan kelembagaan pendidikan dan peran serta masyarakat	Draf Perkom	September – Des 2021	Biro Hukum KPK, KemenpanRB, Kemenkeu, Bappenas

Gambar 12. Pencapaian Milestone Jangka Menengah yang terlaksana di Jangka Pendek

V.3. Pelaksanaan Capaian Kegiatan Milestone Jangka Panjang

Pencapaian kegiatan dalam proyek perubahan ini dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 13. Pencapaian Milestone Jangka Panjang Proper yang terlaksana di Jangka Pendek

Tabel 4. Implementasi Milestone/Pentahapan Kegiatan Jangka Panjang

KEGIATAN	OUTPUT	STATUS	WAKTU	STAKEHOLDER
1. Penyusunan rencana kerja dalam rangka penyusunan naskah akademis UU parpol untuk memasukkan pendidikan anti korupsi dan program intervensi pencegahan korupsi	Draf naskah akademis		Jan – maret 2022	Kesbangpol, LIPI, KPU, Bawaslu, Perludem, Pusako
2. Rangkaian FGD penyusunan Revisi UU Parpol	Naskah akademis		Jan – maret 2022	Kesbangpol, LIPI, KPU, Bawaslu, Perludem, Pusako
3. Kajian bersama politik terkait pendanaan, pilkada dan Sistem integritas parpol	Hasil kajian dan rekomendasi		April-Juni 2022	Deputi pencegahan, LIPI, Parpol
4. Publikasi Kajian politik terkait pendanaan, pilkada dan Sistem integritas parpol	Pemberitaan		Juli – september Juni 2022	Humas . kedeputan pencegahan, dikyanmas

5. Sosialisasi praktik terbaik pendidikan antikorupsi di politik ke parpol	dokumentasi		Juli – september Juni 2022	Kesbangpol, LIPI, KPU pusat dan daerah Bawaslu, Perludem, Pusako, Bappenas
6. Penerapan Kebijakan pendidikan antikorupsi ke seluruh parpol	Laporan dan dokumentasi		September – Des 2022	Kesbangpol, LIPI, Perludem, tokoh masyarakat dan tokoh agama
7. Monitoring dan evaluasi implementasi pendidikan antikorupsi bagi sektor politik	Laporan dan dokumentasi		September – Des 2022	Pimpinan KPK, KPU, Bawaslu Kesbangpol, LIPI, Perludem, tokoh masyarakat dan tokoh agama, Dit.LHKPN, Dit. Gratifikasi, dit.pjkaki, biro humas, Bappenas
8. High level meeting Pertemuan Kebangsaan “ Menyemai Harapan Negeri pasca Pandemi” yang melibatkan Ketua parpol, Kepala Negara, Pimpinan KPK, Tokoh Masyarakat dan agamawan, Budayawan dan perwakilan masyarakat sipil dan media di Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2022	Pemberitaan, Publikasi dan dokumentasi		September – Des 2022	Pimpinan KPK, KPU, Bawaslu Kesbangpol, Bappenas , LIPI, Perludem, tokoh masyarakat dan tokoh agama, Dit.LHKPN, Dit. Gratifikasi, dit.pjkaki, biro humas
9. Peraturan kelembagaan pendidikan dan peran serta masyarakat dan penambahan sumberdaya manusia dan anggaran	Peraturan Komisi	Selesai	September – Des 2022	KemenpanRB, Kemenkumham, Bappenas, Kemenkeu, DPR komisi 3
10. Penyusunan laporan perubahan	Peraturan Komisi		September – Des 2022	KPK, Tokoh lintas agama, Budayawan, Seniman, , masyarakat sipil

 *Terlaksana*

IV.4. Uraian Pencapaian Kegiatan Jangka Pendek

Uraian pencapaian Proyek Perubahan berdasarkan kelompok kegiatan (cluster) adalah sebagai berikut:

Cluster pertama, dilakukan melalui serangkaian kegiatan seperti:

- Membentuk Tim efektif Proyek Perubahan (SK Tim Efektif)
- Melaksanakan rapat dengan Tim efektif (dokumentasi rapat)

- Melakukan Perencanaan program dan anggaran (program dan anggaran)
- Penyusunan bahan pembelajaran untuk pembekalan (materi e-learning dan buku PCB)
- Penyusunan kerangka program intervensi pilkada serentak 2020 (Rangkaian Acara Pembekalan Pilkada serentak 2020)



Gambar 14. Rapat Tim Efektif dan Manajemen Strategis



Gambar 15. Rapat Tim Efektif dan Manajemen Strategis



Gambar 16. Rencana kegiatan Proper cluster 2 Pembekalan Pilkada Serentak

Pada bagian 2 ini adalah pelaksanaan dari Rangkaian kegiatan Pendidikan, sosialisasi dan kampanye Pilkada Berintegritas, yang mencakup”

1. Webinar Pilkada dan Korupsi (Persiapan pembekalan pilkada)
2. Webinar Pembekalan Nasional (dokumentasi)
3. Webinar Regional di 9 Wilayah yang meliputi 270 Pemda (pembekalan, deklarasi LHKPN, Pakta Integritas, Pres conference, Talshow TV/Radio)
4. Deklarasi LHKPN (270 Daerah, 736 Cakada)
5. E-Learning Politik Antikorupsi (aclc.kpk.go.id)
6. Gerakan Kultural Melawan Politik Uang (Seniman dan KOL anti poltiik uang)
7. Talkshow di TVRI Nasional/Daerah “Pilkada Berintegritas” (Dokumentasi dan pemberitaan)
8. Kampanye Pilih Yang Jujur (Penggunaan Multimedia dan implemtasi Marketing Sektor Publik)
9. Roadshow 10 Pesantren PATUH - Pesantren Transparan dan Anti Rasuah (dokumentasi kegiatan dan deklarasi pembentukan pusat kajian antikorupsi pesantren)
10. Roadhow sekolah minggu bersama 91 Sinode Indonesia (Dokumentasi)
11. Webinar dengan Perguruan Tinggi pada ajrangan ACE – Anti Corruption Educators (kampanye pemilih berintegritas)
12. Survei Pasca Pilkada (Melakukan Evaluasi money politik pilkada 2020)

RANGKAIAN PROGAM POLITIK BERINTEGRITAS 2020

- 1. Pembekalan Peserta**
Pemahaman yang utuh sebagai bekal menjalankan roda pemerintahan yang bersih kepada Calon Kepala Daerah
- 2. Pemahaman Penyelenggara**
Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman terkait aspek Antikorupsi kepada KPU dan Bawaslu
- 3. Pemahaman Pemilih**
Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman menggunakan Hak Pilih secara bijak dengan melihat track record Cakada dan proses yang jujur kepada Masyarakat yang memiliki Hak Pilih
- 4. Gerakan Kultural**
Membangun kesadaran dan gerakan tokoh lintas agama, budayawan, seniman dan tokoh masyarakat sipil untuk rakyat melawan politik uang

1. Webinar Nasional
2. Webinar Regional di 9 Wilayah
3. Deklarasi LHKPN
4. Webinar Pilkada dan Korupsi
5. E-Learning Politik Antikorupsi
6. Gerakan Kultural Melawan Politik Uang
7. Talkshow di TVRI Nasional/Daerah "Pilkada Berintegritas"
8. Kampanye Pilih Yang Jujur
9. Roadshow 10 Pesantren PATUH (Pesantren Transparan dan Anti Rasuah)
10. Roadshow sekolah minggu bersama 91 Sinode Indonesia
11. Webinar dengan Perguruan Tinggi
12. Survei Pasca Pilkada

POLITIK CERDAS BERINTEGRITAS

Gambar 17. Cluster 2 Rangkaian Pembekalan Pilkada

Pembekalan dan Jejaring Politikus Antikorupsi 9 PROVINSI

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

25 paslon:

1. Sumbar 4 Bapaslon
2. Jambi 3 Bapaslon
3. Bengkulu 3 Bapaslon
4. Kep. Riau 3 Bapaslon
5. Kalteng 2 Bapaslon
6. Kalsel 2 Bapaslon
7. Kaltara 3 Bapaslon
8. Sulut 3 Bapaslon
9. Sulteng 2 Bapaslon

(Data Silon KPU per 7 Sept 2020) nasional.kompas.com

PILKADA BERINTEGRITAS 2020 | Sept 2020 (AM3: AKHIR MASA JABATAN)

POLITIK CERDAS BERINTEGRITAS

Gambar 18. Wilayah Target Pembekalan Pilkada

37 KOTA & 224 KABUPATEN

PEMILIHAN WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA

PEMILIHAN BUPATI & WAKIL BUPATI

603 paslon Bupati & Wabup di 222 kabupaten

100 paslon Walikota & Wakil Walikota di 37 kota

(Data Silon KPU per 7 Sept 2020) nasional.kompas.com

Pembekalan dan Jejaring Politikus Antikorupsi

PILKADA BERINTEGRITAS 2020 | Sept 2020

POLITIK CERDAS BERINTEGRITAS

Gambar 19. Wilayah Target Pembekalan Pilkada Berintegritas

JADWAL WEBINAR REGIONAL DI 9 WILAYAH

26

Nama Webinar	Waktu	Pimpinan KPK	Daerah Lokus	Jumlah Lokus Pilkada	Satgas
Series 1	22 Oktober	Alexander Marwata	Kalteng* , Sumsel, Sulteng, Banten	2 Provinsi, 3 Kota, 17 Kabupaten	Masipol/Kamp anye
Series 2	27 Oktober	Lili Pintauli Siregar	Kaltara , Sumut*, Malut, Gorontalo	1 Provinsi, 8 Kota, 30 Kabupaten	Kampanye
Series 3	5 November	Nawawi Pomolango	Sulut* , NTB	1 Provinsi, 4 Kota, 10 Kabupaten	Dikti
Series 4	10 November	Firli Bahuri	Kep. Riau* , Lampung, NTT, Kaltim	1 Provinsi, 6 Kota, 26 Kabupaten	Dikti
Series 5	12 November	Nurul Gufron	Bengkulu* , Jabar, Riau, Sulbar	1 Provinsi, 2 Kota, 27 Kabupaten	Masipol
Series 6	18 November	Firli Bahuri	Kalsel* , Sulsel, Babel, DIY	1 Provinsi, 3 Kota, 23 Kabupaten	Masipol/Dikdasmen
Series 7	19 November	Nurul Gufron	Jatim* , Kalbar, Papbar	3 Kota, 32 Kabupaten	Dikdasmen
Series 8	24 November	Alexander Marwata	Jambi* , Jateng, Sultra, Maluku	1 Provinsi, 5 Kota, 31 Kabupaten	Dikdasmen
Series 9	26 November	Lili Pintauli Siregar	Sumbar* , Papua, Bali	1 Provinsi, 3 Kota, 28 Kabupaten	Masipol

1. Tanda * menunjukkan Lokasi Offline Pelaksanaan Acara Webinar Pembekalan Series
2. Huruf cetak tebal menunjukkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
3. Link Join Zoom dan Meeting id otomatis dikirim melalui email yang didaftarkan pada link pendaftaran

PILKADA BERINTEGRITAS 2020 | Nov 2020

POLITIK CERDAS BERINTEGRITAS

Gambar 20. Sembilan Wilayah Target Pembekalan Pilkada Offline dan online

Pada bagian ketiga ini, meliputi:

- Penyusunan surat kepada parpol untuk memasukkan materi antikorupsi kedalam materi pengakderan partai politik, sosialisasi bagi penyelenggara pemilu, dan kampanye sosialisasi bagi pemilih dan masyarakat umum (surat KPK dan draft komitmen)
- Deklarasi dan gerakan melawan politik uang oleh tokoh agama, budayawan dan tokoh masyarakat sipil (Dokumen deklarasi, konpers)
- Pemberitaan di media (berita media masa)



Gambar 21. Flyers promosi acara FGD Inseri Pendidikan Antikorupsi Partai Politik

Dokumen kesepakatan Komitmen yang disepakati 9 Parpol terkait proper sebagai berikut:



Gambar 22. Dokumen Komitmen Parpol Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Parpol

Bagian keempat adalah peningkatan kapasitas lembaga yang menangani Pendidikan meliputi:

- Kajian peningkatan kapasitas kelembagaan Pendidikan Anti Korupsid an Peran Serat Masyarakat sebagai upaya peningkatan daya dan ahsil guna Pemberantasan Korupsi
- Pengajuan kepada KemenpanRB, Kemenkumham, Bappenas, Kemenkeu dan Komisi 3 DPR RI.



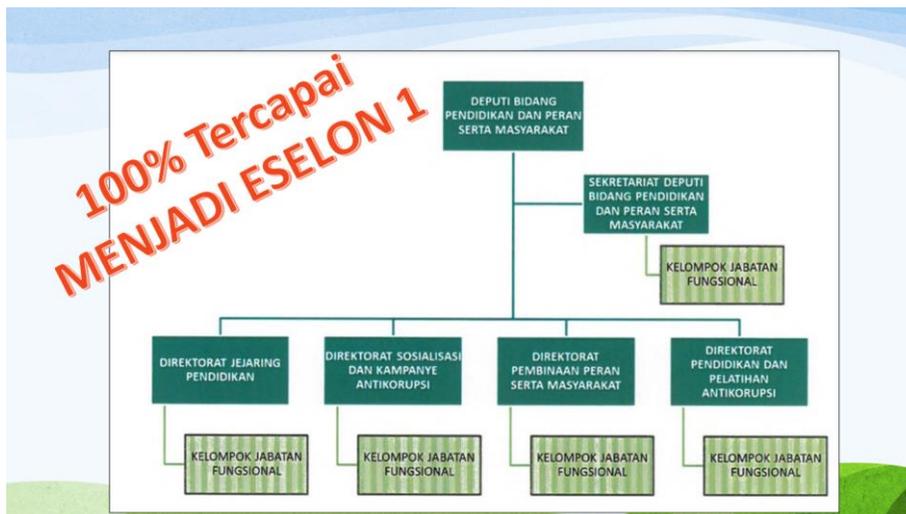
Gambar 23. Kajian Persiapan Kelembagaan KPK yang dipimoin oleh Project Leader

Outline besar kajian kelembagaan adalah sebagai berikut:



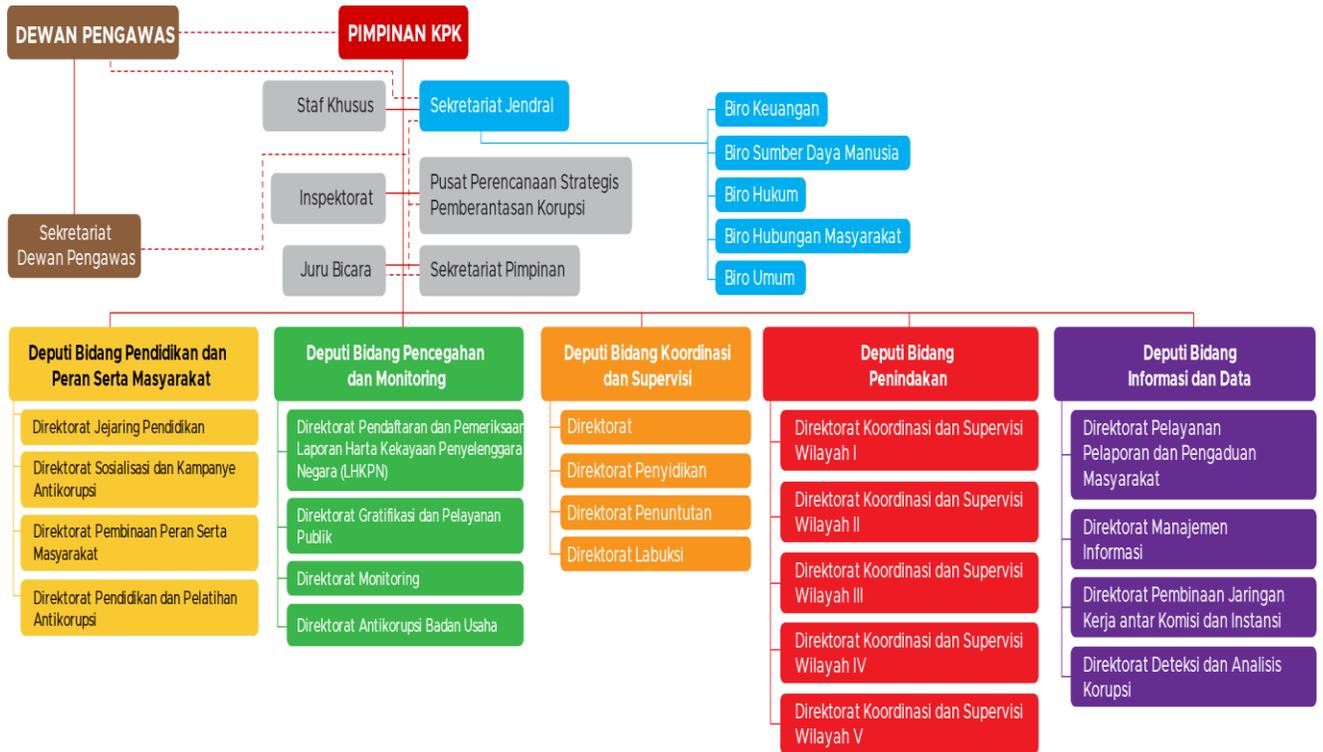
Gambar 24 Daftar isi Kajian Persiapan Kelembagaan KPK yang dipimoin oleh Project Leader

Hasilnya adalah peningkatan status Direktorat Pendidikan an Pelayanan Masyarakat mejadi Kedeputusan Pendidikan dan Peran Serat Masyarakat. Struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 25 Struktur baru Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat

Sedangkan struktur organisai KPK secara utuh sebagai berikut:



Gambar 26 Struktur baru Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Perkom No. 7 Tahun 2020

BAB V

PENGELOLAAN SUMBERDAYA

V.1. Sumberdaya Daya Kebijakan

Sumberdaya kebijakan melalui UU KPK No.19 Tahun 2020 dan Perkom no.7 tahun 2020 sangat membantu pelaksanaan tugas. Surat tugas tim efektif juga sangat berguna untuk memudahkan pengeluaran anggaran.

Modal sumber daya kebijakan tentang pendidikan juga diatur dalam UU Pemilu dan Pilkada, yaitu kebijakan yang mengatur pelarangan politik uang dan korupsi dalam situasi pilkada.

V.2. Sumber Daya Manusia

SDM digunakan adalah pegawai direktorat pendidikan dan pelayanan masyarakat KPK, dan unit terkait didalam KPK seperti Biro Hukum, Biro humas, Unit KKSP, Pusat Edukasi Antikorupsi, unit Koordinasi dan supervisi KPK.

Selain itu, kerjasama dengan mitra stakeholder luar dan multi stakeholder dari luar KPK meliputi Kemendagri, LIPI, 9 Parpol, KPU, Bawaslu, DKPP, Pemda Propinsi dan Kabupaten/kota, media, masyarakat sipil dan lembaga lain sangatlah bagus. Banyak hal besar diselesaikan, dengan kerjasama yang baik dalam proper ini.

V.3. Anggaran

Anggaran cukup memadai dengan cara merevisi anggaran yang ada untuk pembiayaan kegiatan dalam proper ini. Bahkan hasil dari proper ini manikkan anggaran Pendidikan dan peran serta masyarakat KPK, naik ari 14 Milyar menajdi 123,9 Milyar.

V.4. Sarana Prasarana

Sarana prasara sangat mendukung terutama penggunaan teknologi seperti Zoom, webex dan fleksibilitas untuk bisa bekerja dari rumah.

BAB VI

RENCANA STRATEGIS MARKETING

VI.1. Strategi Komunikasi

Strategi Komunikasi yang dilakukan melalui berbagai metode sebagaimana tertuang gambar dibawah:



Gambar 27 Strategi Komunikasi yang dilakukan proper

VI.2. Manajemen Stakeholder

Stakeholder yang terlibat dalam proyek perubahan baik internal dan eksternal antara lain

1. Stakeholder Internal

- Pimpinan KPK
- Kedeputan Pencegahan KPK
- Pusat Edukasi Antikorupsi

2. Stakeholder eksternal

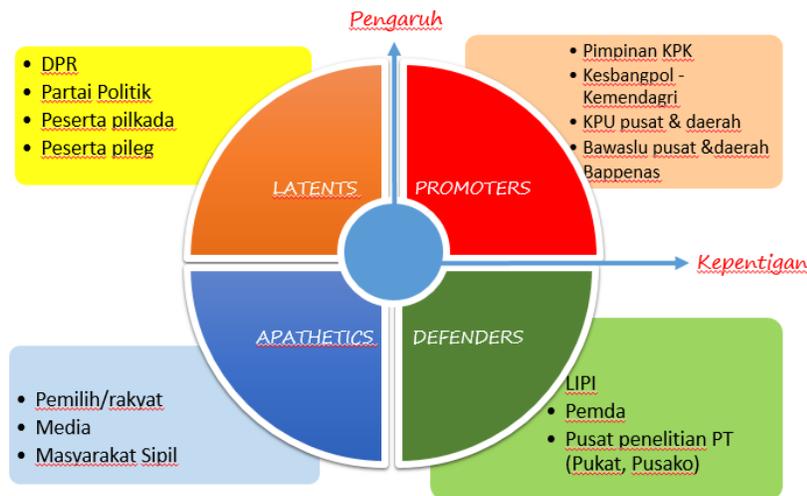
- Kementerian Lembaga
 - Direktorat Kesbangpol Kemendagri
 - P2P LIPI (Pusat Penelitian Politik)

- b. Penyelenggara
 - i. KPU
 - ii. Bawaslu
 - iii. KPUD
 - iv. Bawaslu daerah
- c. Partai Politik
 - i. Sekjen DPP 9 Partai politik di DPR
 - ii. DPW tingkat provinsi
 - iii. DPC tingkat kabupaten/kota
 - iv. Pusat pengkaderan partai
- d. Masyarakat Sipil
 - i. Lakpesdam NU
 - ii. PGI dan 91 sinode
- e. Tokoh lembaga/masyarakat pemerhati isu Politik dan Antikorupsi
- f. Media
- g. Masyarakat Pemilih

Dengan berpaku pada konsep yang ada, pada dasarnya stakeholder dapat dipetakan menjadi 4 kuadaran golongan sebagai berikut:

- a. *Promoters* memiliki kepentingan besar terhadap upaya dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil
- b. *Defenders* memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan kepentingan dukungan dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi
- c. *Latens* tidak memiliki kepentingan tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi
- d. *Apathetics* kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan bahkan tidak mengetahui adanya upaya perubahan

Pemetaan stakeholder sebelum implementasi proper sebagai berikut:

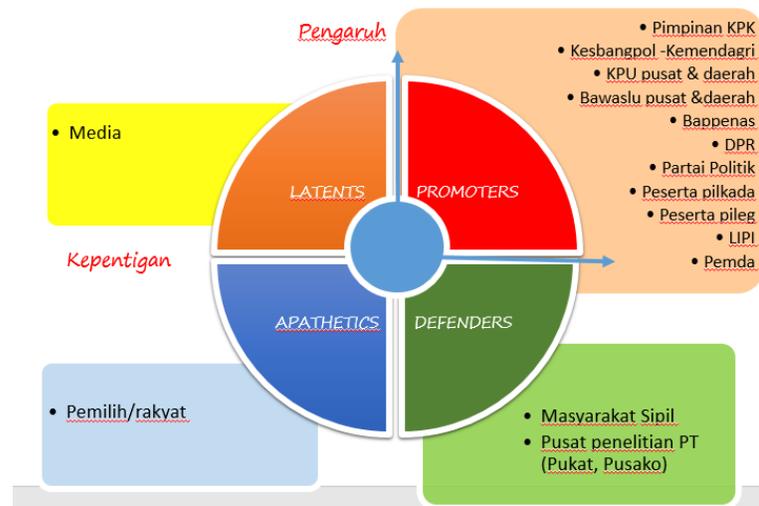


Gambar 28. Kuadran Tingkat Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder sebelum implementasi

Terjadi Pergeseran Kuadran Stakeholder karena:

1. Parpol dan cakada mengapresiasi langkah pendidikan dan pencegahan KPK
2. Media memandang kegiatan pembekalan, insersi menjadi berita menarik selain OTT. Pemberitaan terkait kegiatan proper banyak sekali
3. LIPI sudah menjadi bagian working group Insersi pendidikan antikorupsi berkolaborasi dengan KPK, sehingga mempunyai pengaruh lebih kuat ke parpol

Pemetaan stakeholder setelah implementasi proper sebagai berikut:



Gambar 29. Kuadran Tingkat Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder setelah implementasi proper

BAB VII

STRATEGI DIALOG DAN PEMASARAN SEKTOR PUBLIK

VII.1. Strategi Dialog

Strategi dialog dilakukan dengan mitra stakeholder dalam rentang yang cukup luas, karena proper ini adalah perubahan bagi Indonesia yang lebih baik. Acara acara melibatkan tokoh politik seniman dan artis, pejabat parpol, tokoh agama dan tokoh masyarakat, tim efektif dan pengambil keputusan yang penting lainnya.

Dialog yang digunakan adalah partisipatif . Konsep sialog strategis ini sangat penting, karena setiap organisasi harus melakukan dialog dan melaksanakan proper. Karena konsekuensi serius dari tidak adanya dialog adalah organisasi tersebut sulit mencapai visi dan misinya, eksklusif, ada missing link program sampai dengan tumbuhnya ketidakpercayaan masyarakat sebagai indikatornya. Keberadaan konsep Dialog Strategis sangat penting dalam kepemimpinan proper di bidang pendidikan antikorupsi bagi politisi, karena program dan strategi akan menjadi sangat bermutu dan berdampak besar. Metode yang digunakan adalah SOAR.

Project leader sangat menjunjung partisipasi, menggunakan logika yang runut, melibatkan seluruh stakeholder, penyusunan visi dan misi yang jeals, mengakomodasi tantangan masa depan, dan adanya pembagian peran dan target kinerja yang jelas. Manfaat Dialog strategis sangat banyak seperti kondisi lingkungan kerja menjadi kondusif, tim efektif kemampuannya meningkat dengan tantangan yang besar, terbangunnya sinergi antara KPK dan mitra, sehingga outcomenya lebih bisa dirasakan manfaatnya bagi publik, dipercaya dan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

VII.2. Pemasaran Sektor Publik

Marketing Sektor Publik dengan menggunakan metode 4P 1 C tertuang sebagai berikut:



Gambar 30. Implementasi Marketing Sektor Publik

Strategi marketing Strategis difokuskan untuk mencapai program jangka pendek, yang diuraikan sebagai berikut:

A. Product

Produk yang dilakukan marketing strategis adalah:

- Membangun Komitmen & Akses informasi terkait pelaksanaan pelatihan dan pengkaderan partai politik di setiap parpol
- Menyusun Pedoman untuk mengintegrasikan Pendidikan Antikorupsi dalam pengkaderan partai
- Menyusun bahan pembelajaran pendidikan antikorupsi bagi sektor politik
- Rencana Program dan kegiatan pembekalan pilkada serentak, kampanye politik berintegritas, diskusi tematik pilkada dan politik
- Pelaksanaan Program dan kegiatan pembekalan pilkada serentak, kampanye politik berintegritas, diskusi tematik pilkada dan politik
- Menguatnya kelembagaan di internal KPK yang menangani pendidikan antikorupsi di KPK yang lebih kuat dan memadai seperti peningkatan level Eselon atau komitmen sumberdaya (anggaran dan SDM)

- Program PROPAPOL (Program Pendidikan Antikorupsi untuk Politisi)

B. Place

- Parpol (Pembekalan, sosialisasi, pendidikan kader)
- Penyelenggara Pemilu (Pilkada serentak 2020)
- Kampanye Pilih yang jujur melalui Media masa bagi Pemilih

C. Price

- Anggaran APBN-KPK

D. Promotion

- Melalui TV, Radio, youtube, facebook, medsos, google ads, google playstore
- Pemberitaan dan Media Handling
- Produk cetak (brosur, spanduk, iklan media)
- Pelibatan tokoh agama dan budayawan serta masyarakat sipil
- Program PROPAPOL (Program Pendidikan Antikorupsi untuk Politisi)
- Pelibatan KOL (Key Opinion Leader)

E. Customer

- 1. Parpol/Cakada
- 2. Penyelenggara Pilkada serentak
- 3. Pemilih Pilkada



Gambar 31. Logo branding Marketing Sekor Publik PROPAPOL

BAB VIII

FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Belajar dari pelaksanaan proper ini, kunci keberhasilan suatu perubahn ditentukan oleh bebebrapa hal sebagai berikut:

1. Dukungan dari Elite Partai Politik, Pimpinan lembaga, dan stakeholder
2. Dukungan komunikasi politik Pimpinan KPK dan agen Proper
3. Tim efektif yang kuat dan persistence (tangguh)
4. Kemasan Branding-marketing yang menarik
5. Ketersediaan anggaran dan SDM
6. Komitmen KPU, Bawaslu, Kemendagri, LIPI dan Pemerintah daerah dan stakeholder dalam proper
7. Bahan pembelajaran yang cocok dan tepat untuk politikus
8. Dukungan teknologi webinar dan pelatihan e-learning
9. Time management

Project Leader sangat bersukur, dengan penerapan ilmu yang didapatkan di diklatpim implementasi proper menjadi lancar dan melebihi yang direncanakan.

BAB IX

KENDALA, RESIKO DAN SOLUSI

G. Kendala, risiko, dan solusi saat implementasi

Dalam pelaksanaan proper ini diuraikan kendala, resiko dan solusi sebagai berikut. Walauoun adan kendala dan keterbatasan, semuanya bisa diatasi dan pencapain dilakukan melebihi 100%.

- Kendala yang dihadapi:
 - Waktu implementasi kegiatan sangat terbatas di tengah situasi pandemi
 - Pandemi Berkelanjutan, keterbatasan pelaksanaan acara dan ahrus menggunakan teknologi daring
- Risiko:
 - Hasil dokumentasi proses proper kurang maksimal umumnya berbentuk visualisasi daring (webinar, zoom, dsb)
- solusi:
 - Penggunaan teknologi
 - Sinergi acara menajdi bertema politik cerdas berintegritas
 - Berkolaborasi dengan gerakan kultural

Bab X

LESSON LEARNED KEPEMIMPINAN

Setelah 2 bulan lebih menjalankan proyek perubahan, aa banyak pelajaran yang bisa diambil antara lain:

1. Komunikasi secara informal dan strategis dari Elite Partai Politik, Pimpinan lembaga, dan stakeholder
2. Tim efektif yang kuat dan persistence (tangguh) adalah andalan dalam perubahan, dibutuhkan memberikan contoh keteladanan
3. Membangun rasa kepemilikan (ownership) kepada tim efektif dan stakeholder sangatlah penting, agar ada proses kolaborasi dan kerjasama
4. Kemasan Branding-marketing & kepemimpinan kewirausahaan yang baik didukung tokoh masyarakat, agama, budayawan, seniman membantu kesuksesan program
5. Kepemimpinan yang adaptif, sangat membantu untuk mempertahankan daya tahan tim, dan organisasi. Kreatifitas berkembang dalam iklim adaptif
6. Memperkuat kelembagaan membutuhkan organisasi yang agile, progresif dan inovasi tanpa henti.
7. Time management adalah bagian penuh tantangan dalam keterbatasan
8. Berusaha keras, berencan yang baik dan memulai langkah pertama adalah hal terpenting dalam perubahan, selebihnya atas kehendak semesta perubahan untuk kebaikan akan terjadi.

BAB XI

MANAJEMEN ORGANISASI PEMBELAJAR

Untuk mengelola perubahan dibutuhkan upaya dan pola baru dalam manajemen untuk menjadi organisasi pembelajar sebagai teruraikan dalam tabel berikut:

No	Kegiatan	Output	Waktu	PIC	Keterangan
1	Pelatihan Pegawai	Peningkatan kompetensi SDM	Okt-Des 2020	Sesuai kebutuhan	Sesuai analisa kebutuhan
2	Knowledge Sharing	Peningkatan kompetensi SDM	Okt-Des 2020	Semua pegawai	Narsum adalah baru selesai atau pakar
3	Coaching, mentoring, counselling	Meningkatkan kinerja & motivasi	Okt-Des 2020	Kasatgas dan ketua tim	Khusus pegawai dengan perhatian
4	Pelatihan komunikasi dan Presentasi	Peningkatan kompetensi SDM	Okt-Des 2020	Semua pegawai	Termasuk media handling
5	Morning pray	Perencanaan, Koordinasi & evaluasi kinerja	Okt-Des 2020	Kasatgas dan semua pegawai	Rapat rutin pagi dengan kasatgas, dan direktorat
6	Tim Building	Soliditas dan endurance	Okt-Des 2020	Seluruh pegawai	Raker
7	Lunch break meeting	Kerjasama dan kolaborasi	Okt-Des 2020	Kasatgas dan Ketua tim	Dilakukan sebagai reward & membangun iklim egalitarian

Gambar 32. Daftar Manajemen Organisasi Pembelajar



Gambar 33. Dokumentasi Manajemen Organisasi Pembelajar

LAMPIRAN DAN LINK

Semua Lampiran disimpan dalam google drive sebagai berikut:

- <https://drive.google.com/drive/folders/1-KCaDwM09ALCvn5Lryyq1tlCktNYsWUQ?usp=sharing>
- https://drive.google.com/drive/folders/1YANBBkhh4mzxIeW42ombM3_eGqYkXgj?usp=sharing
- https://drive.google.com/file/d/1j7CoTPpokrGf5_HTix81crWNZfW_b4Zu/view?usp=sharing

Meliputi dokumen sebagai berikut:

Lampiran 1.	Surat Tugas tim Efektif.....
Lampiran 2.	Rencana kegiatan Pendidikan, sosialisasi Pilkada Berintegritas.....
Lampiran 3.	Dokumenatsi Pembekalan Pilkada Berintegritas Nasional
Lampiran 4.	Dokumentasi Pembekalan Pilkada Berintegritas Wilayah 1 sd 9.....
Lampiran 5.	Video pelaksanaan rangkaian kegiatan Pilkada Berintegritas
Lampiran 6.	Pemberitaan pembekalan Pilkada Berintegritas.....
Lampiran 7.	Lembar Komitmen 9 Parpol.....
Lampiran 8.	Video konpers insersi pendidikan antikorupsi pada parpol
Lampiran 9.	Logo PROPARPOL.....
Lampiran 10.	Testimoni peserta Pembekalan dari 3 Cakada
Lampiran 11	Testoni dari LIPI dan Kemendagri
Lampiran 12	Peraturan KPK no 7 Tahun 2020.....
Lampiran 13	Anggaran Baru Kekeputian Pendidikan dan Peranserta Masyarakat.....
Lampiran 14	Renstra KPK 2020-2025.....
Lampiran 15	Video Gerakan musisi, budayawan dan artis melawan korupsi & politikus
Lampiran 16	Video Key Opinion Leaders.....
Lampiran 17	Pemberitaan terkait proper

Lampiran 18 *Terstimoni Pejabat Parpol*

Lampiran 19 *Testimoni mentor*

Lampiran 20 *Testimoni Pimpinan KPK*.....

Lampiran 21 *Video Gerakan musisi, budayawan dan artis melawan korupsi & politik uang*

Lampiran 22 *Video Key Opinion Leaders*.....

Lampiran 23 *Kajian Penguatan kapasitas kelembagaan Pendidikan dan Peserta Masyarakat*

Lampiran 24 *Struktur baru KPK tahun 2020*.....

Lampiran 25 *Peraturan KPK no 7 Tahun 2020*.....

Lampiran 26 *Anggaran Baru Keputusan Pendidikan dan Peserta Masyarakat*.....

Lampiran 27 *Video KOL (Key Opinion leader)*